



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Kotawaringin Timur dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini digunakan untuk membuktikan sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan tersebut setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra-mitra kerja v Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2023



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur akan mempersiapkan SDM dan infrastruktur untuk mendorong pelayanan publik prima yang dicanangkan oleh Bupati Kotawaringin Timur untuk mendukung Zero Complain Governance dengan memperhatikan kondisi perkembangan Perdagangan dan Industri di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang memuaskan. Rincian capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan masing-masing sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase pedagang informal menjadi formal	%	11,30%	10,77%	95,31%
2.	Tingkat lonjakan harga	%	1,30%	0,57%	43,85%
3.	Realisasi Ekspor	\$	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,56	93,07%
4.	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	100%	124%	124%
5.	Tingkat alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	100%	124%	124%
6.	Persentase Kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah	%	2,25%	2,03%	92,22%
7.	Persentase IKM yang meningkat omzetnya	%	3%	2,84%	94,67%
8.	Persentase Koperasi Aktif	%	80%	76%	95%
9.	Persentase Koperasi Sehat	%	60%	53%	88,33%
10.	Jumlah Wirausaha baru	Jumlah	500	610	122%
11.	Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	Jumlah	100	89	89%
Capaian Kinerja					97,43%



Dengan nilai capaian 97,43% dapat dikatakan “baik sekali” dan pencapaian keuangan sebesar 88,26% atau “baik”. Demikian ringkasan eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotawaringin Timur

FAHRUJIANSYAH, S.E.

Pembina Tk.I

NIP. 19730222 199803 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya sesuai dengan SOTK. Sasaran dan Indikator Kinerja yang ada sehingga parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai outcome yang diharapkan. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Sampit, 2 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Timur

FAHRUJANSYAH, S.E.
Pembina Tk.I
NIP. 19730222 199803 1 008

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Ringkasan Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang SKPD	1
1.2 Gambaran Singkat Organisasi	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	15
1.5 Isu Strategis	16
1.6 Dasar Hukum	19
1.7 Sistematika Penyajian	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis Dinas	22
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	23
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	28
2.5 Rencana Anggaran Disperdagin Tahun 2023	29
BAB III AKUNTABILITAS	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2 Realisasi Anggaran	113
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	119
BAB IV PENUTUP	128
4.1 Kesimpulan	128
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	129
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	16
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis.....	22
Tabel 2.2	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU).....	26
Tabel 2.3	Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 2.5	Pagu Anggaran	30
Tabel 3.1	Capaian Rata-rata Atas Indikator Kinerja	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 3.3	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024	38
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja	40
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2024 Indikator Persentase Pedagang Informal Menjadi Formal	41
Tabel 3.6	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Indikator Persentase Pedagang Informal Menjadi Formal	42
Tabel 3.7	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024	47
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja	50
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2024 Indikator Tingkat Lonjakan Harga	50
Tabel 3.10	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Indikator Tingkat Lonjakan Harga	51
Tabel 3.11	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024	55
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja	57
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2024 Indikator Realisasi Ekspor	57
Tabel 3.14	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Indikator Realisasi Ekspor	58
Tabel 3.15	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024	62
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja	64
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2024 Indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	65
Tabel 3.18	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	66
Tabel 3.19	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2023	70
Tabel 3.20	Pengukuran Kinerja	72

Tabel 3.21	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2024 Indikator Persentase Kenaikan Status Industri dari Kecil Menjadi Menengah dan Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	74
Tabel 3.22	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Indikator Indikator Persentase Kenaikan Status Industri dari Kecil Menjadi Menengah dan Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	75
Tabel 3.23	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024.....	80
Tabel 3.24	Pengukuran Kinerja.....	83
Tabel 3.25	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024.....	86
Tabel 3.26	Pengukuran Kinerja.....	88
Tabel 3.27	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	92
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2024.	94
Tabel 3.29	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	100
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi	102
Tabel 3.31	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	103
Tabel 3.32	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	110
Tabel 3.33	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024	113
Tabel 3.34	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	120
Tabel 3.35	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Kegiatan	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
1.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Tahun 2024	14
1.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024	15
3.1	Persentase Pedagang Informal Menjadi Formal	40
3.2	Tingkat Lonjakan Harga.....	49
3.3	Realisasi Ekspor	56
3.4	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	62
3.5	Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	63
3.6	Persentase Kenaikan Status Industri Kecil Menjadi Menengah	73
3.7	Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya	73
3.8	Persentase Koperasi Sehat.....	81
3.9	Persentase Koperasi Aktif	82
3.10	Jumlah Wirausaha Baru.....	88
3.11	Jumlah Usaha Mikro Yang Mengalami Kenaikan Status.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG SKPD

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim diwajibkan untuk



menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Diskopukmperindag) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 30) menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 30 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 30 Tahun 2023 tentang susunan organisasi dan rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai tugas pokok dan merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan



Perdagangan serta ketatausahaan Dinas. Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, mengarahkan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan perindustrian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian diatas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. memimpin semua kegiatan kedinasan di Bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan;
- b. mengoordinir upaya-upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengawasi, mengevaluasi penilaian dan umpan balik pelaksanaan tugas pokok dan unit-unit kerja di bawahnya; mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada unit kerja di bawahnya baik lisan maupun tertulis, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;
- f. melaksanakan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- g. mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan anggaran satuan kerja pada dinas;
- h. melaksanakan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;



- i. melaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan serta bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- j. mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi dinas dan jabatan fungsional pada Dinas;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas, laporan keuangan dan laporan kinerja serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoodinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan pelaporan serta keuangan dan perencanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rupa-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan dan penyusunan program dinas



- g. mengarahkan, membina, mengendalikan dan merumuskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga serta keprotokolan dan humas di lingkup Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi program serta merumuskan penyusunan laporan kinerja Dinas, dan laporan keuangan Dinas serta evaluasi setiap bidang sebagai sebagai pertanggungjawaban Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan *Peta Proses Bisnis (Probis)*, dan *Standart Operating Procedure (SOP)*;
- j. melaksanakan pengorganisasian penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah pada Dinas dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas;
- l. mengkoordinir pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai ASN pada Sekretariat Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- q. Membagi tugas dan rencana program kerja sekretariat;
- r. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh Kepala Bidang dilingkungan Dinas;

Sekretaris, membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan



3. Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program, menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta membimbing, membina dan mengembangkan bidang organisasi dan tata laksana koperasi, bidang pemberdayaan serta bidang pembinaan dan pengawasan koperasi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang koperasi tiap tahun anggaran berdasarkan hasil yang telah dicapai pada tahun yang lalu sesuai dengan arah kebijaksanaan yang telah ditentukan;
- b. mengoordinasikan dan membagi pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan bidang koperasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing agar seluruh tugas terlaksana dengan baik;
- c. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada pejabat fungsional dan pelaksana pada bidang koperasi yang meliputi perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dalam rangka membimbing, membina dan mengembangkan organisasi, kelembagaan, pemberdayaan serta pengawasan dan pengendalian koperasi;
- d. mengatur pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan bidang koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaan;
- e. memberikan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- f. merumuskan dan mempersiapkan petunjuk dan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pembentukan koperasi dan penerbitan pengesahan akta pendirian dan pembubaran serta amalgamasi Koperasi;
- g. mempersiapkan petunjuk pembinaan dan bimbingan, pengembangan organisasi dan kelembagaan, pemberdayaan serta pengawasan dan pembinaan koperasi;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan organisasi kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;



- i. menginventarisasi data dan informasi perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. membina kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan koperasi;
- k. menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang Koperasi sesuai dengan prestasinya;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang koperasi kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas sehari-hari.

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program, menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta membimbing, membina dan mengembangkan bidang pemberdayaan serta bidang pembinaan dan pengawasan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang usaha mikro kecil dan menengah tiap tahun anggaran berdasarkan hasil yang telah dicapai pada tahun yang lalu sesuai dengan arah kebijaksanaan yang telah ditentukan;
- b. mengoordinasikan dan membagi pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan bidang usaha mikro, kecil dan menengah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing agar seluruh tugas terlaksana dengan baik;
- c. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada pejabat fungsional dan pelaksana pada bidang pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil dan menengah;



- d. mengatur pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan bidang usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaan;
 - e. merumuskan dan mempersiapkan petunjuk dan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pembentukan dan penerbitan pengesahan akta pendirian dan pembubaran serta amalgamasi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. mempersiapkan petunjuk pembinaan dan bimbingan, pengembangan organisasi dan kelembagaan, pemberdayaan serta pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan organisasi kelembagaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. menginventarisasi data dan informasi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. membina kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - j. menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan prestasinya;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang usaha mikro, kecil dan menengah kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas sehari-hari.
5. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok memimpin, koordinasi, menyelenggarakan kegiatan pembinaan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengembangan sarana usaha dan produksi, pemantauan



serta evaluasi kegiatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Perindustrian;
- d. menyusun rancnagan, mengoreksi, memaraf dan.atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan operasional teknis/standar operasional prosedur pelayanan Bidang Perindustrian;
- g. melaksanakan pendataan potensi, pengembangan industry, data Kawasan industry dan data lain, melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan inovasi industry serta fasilitasi dan standarisasi industry;
- i. melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dalam bidang industry;
- j. melaksanakan pengembangan, pembinaan dan peningkatan Kerjasama bidang Perindustrian;
- k. melaksanakan penyediaan pedoman penyusunan rencana pembangunan industry Kabupaten;
- l. menyusun tata ruang industi dalam rangka pengembangan Kawasan peruntukan industry;
- m. melaksanakan pembinaan industry dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industry;
- n. melaksanakan pengawasan dan fasilitasi penerapan standar bagi industry serta pemberian perlindungan kepastian usaha industry;
- o. melaksanakan peningkatan standar kompetensi sumber daya manusia industry dan aparaturn Pembina industry;



- p. melaksanakan pembinaan asosiasi, organisasi dan unit pelaksana teknis bidang industri;
- q. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan industri;
- r. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
- s. melaksanakan penerbitan/rekomendasi, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), kewenangan Kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Kabupaten melalui SIINas;
- t. melaksanakan diseminasi dan publikasi data informasi dan Analisa Industri Kabupaten melalui SIINas;
- u. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas;
- v. melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif;
- w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi terkait percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industry serta pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat;
- x. menilai kinerja pegawai ASN di bidang perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



6. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok memimpin menyiapkan kebijakan teknis, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bidang Perdagangan, menganalisa, merumuskan, menyusun kebijakan teknis terkait pengembangan sarana perdagangan dan pemungutan retribusi serta menyusun kebijakan operasional penataan kebersihan, keamanan, ketertiban dan pengawasan pasar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Perdagangan;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rupa-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengembangan, pembinaan dan peningkatan Kerjasama Bidang Perdagangan;
- g. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan serta pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal;
- j. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- k. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
- l. melaksanakan pengembangan produk local dan ekspor, sarana dan iklim usaha;



- m. meningkatkan penggunaan produk local dan ekspor, sarana dan iklim usaha;
- n. kmelakukan koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan(pelaku UMKM sektor perdagangan);
- o. menyelenggarakan dan/atau partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang local dan misi dagang bagi produk ekspor daerah;
- p. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- q. melaksanakan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten;
- r. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten;
- s. melaksanakan penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten;
- t. melaksanakan penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten;
- u. melaksanakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- v. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah diwilayah kerjanya;
- w. melaksanakan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang ketuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- x. melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- y. melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perdagangan dan pasar;
- z. melaksanakan penyiapan rumusan operasional teknis/standar prosedur operasional bidang Metrologi Legal;

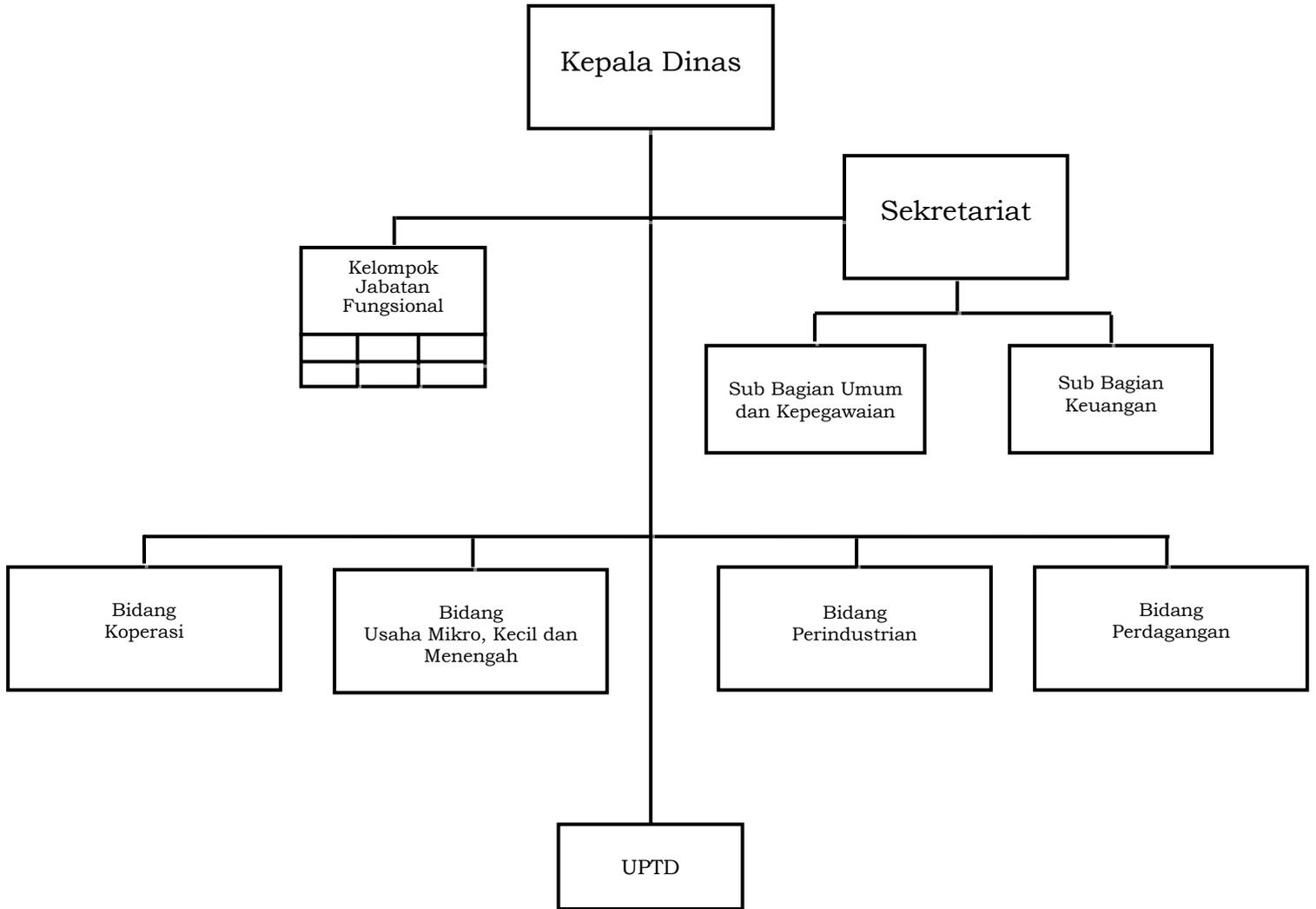


- aa. melaksanakan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- bb. melakukan pemetaan jumlah potensi ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- cc. mengelola cap tanda tera;
- dd. melaksanakan pengawasan ukur ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- ee. melaksanakan penyuluhan kemetrologian;
- ff. melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- gg. melaksanakan fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- hh. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- ii. menyusun pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
- jj. melaksanakan penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024**

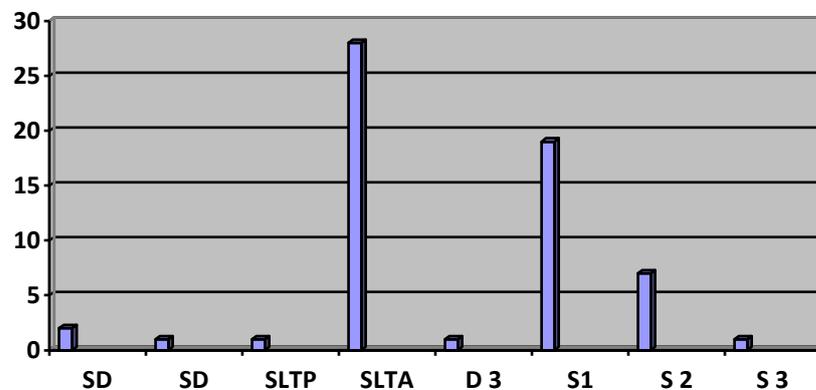




1.4. SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sumber Daya Aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan saat ini memiliki aparat/personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2024 sebanyak 49 Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 43 pegawai pria dan 6 orang pegawai wanita. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur tercantum pada diagram berikut :

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur menurut pendidikan Tahun 2024



Gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur berpendidikan terakhir SLTA/SMA. Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			P	L
1	Golongan I A	-	9	49
	Golongan I B	-		
	Golongan I C	-		
	Golongan I D	1		
2	Golongan II A	3		
	Golongan II B	11		
	Golongan II C	7		
	Golongan II D	6		
3	Golongan III A	5		
	Golongan III B	3		
	Golongan III C	-		
	Golongan III D	14		
4	Golongan IV A	6		
	Golongan IV B	1		
	Golongan IV C	1		
	Golongan IV D	-		
	Golongan IV E	-		

1.5. ISU STRATEGIS

Potensi Sumber daya alam (hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan, kelautan dan perikanan dll, di Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersifat common properti dan open access, semua orang boleh memanfaatkan sumber daya tersebut dengan berbagai kepentingan sebagai penopang bagi kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan daya dorong bagi pertumbuhan dan memulihkan perekonomian, namun hal ini belum dikelola



secara optimal dalam rangka memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sumber daya alam sebagian besar belum diolah menjadi suatu produk yang berkualitas, bermutu dan bernilai tinggi, di perdagangkan dalam bentuk bahan mentah sehingga kurang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum berkembangnya usaha sentra/ cluster untuk meningkatnya aksesibilitas usaha kecil dan menengah, terutama akses terhadap pasar, modal dan akses terhadap teknologi dan manajemen.

Sebagai upaya yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan atau hal-hal menjadi penyebab hambatan yang telah dilakukan dalam tahun terakhir yang telah diuraikan diatas, maka akan dianalisis dalam bentuk isu-isu strategis agar perkembangan dinamika usaha dapat berjalan secara otomatis dan bersifat berkelanjutan melalui inisiatif masyarakat perlu diwujudkan arah pembangunan dengan memperhatikan permasalahan yang menjadi prioritas pembangunan.

Berdasarkan uraian pada penjelasan sebelumnya berkenaan dengan kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat diidentifikasi permasalahan disektor perdagangan dan perindustrian. Mengacu pada analisa kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu :

- 1) Terbatasnya penyediaan Sumber Daya Manusia Industri yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri di daerah, termasuk masih lemahnya kemampuan (skill) aparat Pembina, keterbatasan wawasan bisnis serta pengetahuan usaha (manajerial, operasional).
- 2) Kesulitan mendapatkan akses pasar karena terbatasnya pengetahuan mengenai jaringan-jaringan informasi dan komunikasi.
- 3) Kurangnya fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh lembaga perbankan / BUMN dibidang perkreditan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri dari pedagang kecil dan menengah.



- 4) Kontinuitas produksi masih belum stabil khususnya pada kelompok industri kecil, pertanian dan kehutanan.
- 5) Masih banyaknya dijumpai pengusaha industri dan pedagang yang belum melaksanakan kewajiban dan memahami peraturan yang berlaku di bidang industri dan perdagangan.
- 6) Mutu produksi yang dihasilkan sebagian masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pasaran ekspor.
- 7) Terbatasnya jenis komoditi ekspor dan didominasi hasil dari sektor kehutanan karena kurangnya minat investor untuk menanamkan investasinya diluar industri hasil hutan.
- 8) Luasnya wilayah pembinaan, sehingga tidak semua daerah mendapatkan pembinaan dan bimbingan di sektor industri dan perdagangan.
- 9) Terbatasnya sumber pembiayaan, kurangnya sarana transportasi dan sarana pemeriksaan dan pengujian pencemaran akibat limbah industri / sektor industri dan perdagangan.
- 10) Kurangnya promosi potensi daerah mengenai hasil berbagai sektor.
- 11) Pada umumnya sebagian besar sembako dan barang penting lainnya didatangkan dari luar daerah sehingga pengadaan dan penyaluran sangat bergantung pada daerah sumber pengadaan (pulau Jawa).
- 12) Masih banyak daerah yang hubungan transportasi daratnya belum lancar. Angkutan ke daerah tersebut pada umumnya menggunakan jalur transportasi sungai yang makin ke hulu semakin kecil dan semakin banyak riam serta terhadap musim hujan dan musim kemarau sehingga mengakibatkan angkutan sembako dan barang penting lainnya terkendala dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan suatu barang dan harga pun melonjak naik.



- 13) Terbatasnya sarana ekonomi yaitu sarana penunjang industri dan perdagangan antara lain lembaga-lembaga perdagangan seperti agen, dialer, distributor barang penting dan barang pengumpul.
- 14) Perlindungan terhadap konsumen belum optimal
Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetriologian. Selain itu penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU perlindungan konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan, serta tempat pengaduan konsumen yang belum tersedia.
- 15) Minimnya sarana penunjang ekspor antarlain angkutan/penerbangan langsung ke kota-kota tertentu, perusahaan peti kemas baru satu akibatnya tariff tidak berkontitif dan pusat informal/bisnis.
- 16) Lambannya diversifikasi komoditi dari kayu, rotan dan karet serta struktur industri komoditi ekspor masih bersifat industri hulu.
- 17) Lambatnya peralihan fungsi lahan pada kawasan perdagangan sesuai RTRWK, yang menimbulkan berbagai macam permasalahan di kompleks pasar / pertokoan.

1.6. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 4) Peraturan Presiden no. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 6) Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0413/Huk-ORG/2021 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9);
- 11) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur;



1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

<i>Ringkasan Eksekutif</i>	Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024
<i>BAB I Pendahuluan</i>	Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, struktur organisasi & tugas dan fungsi, isu strategis, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LKIP.
<i>BAB II Perencanaan Kinerja</i>	Menguraikan tentang Perencanaan strategis sebelum reviu dan setelah reviu
<i>BAB III Akuntabilitas Kinerja</i>	Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
<i>BAB IV Penutup</i>	Penutup LKIP 2024
<i>Lampiran</i>	Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, dan lampiran lainnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026. Sesuai dengan RPJMD Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :



VISI

“Terwujudnya Masyarakat yang madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan misi ke 3 dari pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

MISI 3

Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Penyediaan Lapangan Kerja

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini berjalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menciptakan Perekonomian yang berdaya saing

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai



aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

VISI : "Terwujudnya Masyarakat yang madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera"		
MISI 3 : "Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Penyediaan Lapangan Kerja"		
NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan pengembangan perdagangan	Meningkatnya kelembagaan perdagangan
2.	Meningkatnya nilai perdagangan	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang dan jasa
3.	Meningkatnya nilai perdagangan ekspor	Meningkatnya nilai ekspor
4.	Meningkatkan kinerja Metrologi Legal	Meningkatnya Tertib Ukur
5.	Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah
6.	Memantapkan kelembagaan Koperasi sesuai jati diri sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi
7.	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Meningkatnya pendapatan usaha mikro



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah. Berikut ini tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur.



Tabel 2.2
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH					
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 - 2026					
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA BIDANG PENANGGUNG JAWAB /PELAKSANA
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	%	$\frac{\text{Jumlah Pedagang Informal} - \text{Jumlah Pedagang formal}}{\text{Jumlah Pedagang}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	%	$\frac{\text{Harga thn } (n) - \text{Harga thn } (n-1)}{\text{Harga thn } (n)} \times 100\%$	Bidang Perdagangan
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Realisasi Ekspor	\$	Jumlah Realisasi Ekspor	Bidang Perdagangan
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda	%	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku}}{\text{Jumlah UTTP Yang Tidak Bertanda Tera Sah Yang Berlaku}} \times 100\%$	Bidang Metrologi Legal
		Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang	%	$\frac{\text{Jumlah Alat UTTP yang sudah ditera}}{\text{Jumlah seluruh alat UTTP}} \times 100\%$	Bidang Metrologi Legal
5	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	%	$\frac{\text{Jumlah Industri Kecil} - \text{Jumlah Industri Menengah}}{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian
		Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya	%	$\frac{\text{Omzet IKM tahun } (n)}{\text{Omzet IKM tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Perindustrian
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	Bidang Koperasi
		Persentase Koperasi Sehat	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100 \%$	Bidang Koperasi
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	Jumlah	$\frac{\text{Jumlah wirausaha baru}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100 \%$	Bidang UMKM
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	Jumlah	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil}}{\text{Jumlah total usaha mikro}} \times 100 \%$	Bidang UMKM



Pada tabel berikut ini dapat dilihat matrik hubungan antara tujuan dengan sasaran. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.3
Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	
1.	Meningkatkan pengembangan perdagangan	1	Meningkatnya kelembagaan perdagangan	1	Persentase pedagang informal menjadi formal
2.	Meningkatnya nilai perdagangan	2	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang dan jasa	2	Tingkat lonjakan harga
3.	Meningkatnya nilai perdagangan ekspor	3	Meningkatnya nilai ekspor	3	Realisasi ekspor
4.	Meningkatkan kinerja Metrologi Legal	4	Meningkatnya Tertib Ukur	4	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku
				5	Tingkat alat UTTP yang ditera/tera ulang
5.	Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah	5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	6	Persentase kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah
				7	Persentase IKM yang meningkat omzetnya
6.	Memantapkan kelembagaan Koperasi sesuai jati diri sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan	6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	8	Persentase Koperasi Aktif
				9	Persentase Koperasi Sehat
7.	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	10	Jumlah Wirausaha baru
				11	Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status



2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kelembagaan perdagangan	Persentase pedagang informal menjadi formal	11,30%	11,30%
2	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang dan jasa	Tingkat lonjakan harga	1,25%	1,30%
3	Meningkatnya nilai ekspor	Realisasi ekspor	\$ 51,132,970.56	\$ 51,132,970.56
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang	100%	100%



		Berlaku		
		Tingkat alat UTTP yang ditera/tera ulang	100%	100%
5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah	2%	2,25%
		Persentase IKM yang meningkat omzetnya	2,50%	3%
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80%	80%
		Persentase Koperasi Sehat	60%	60%
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	500	500
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	100	100

2.5 RENCANA ANGGARAN DISKOPUKMPERINDAG TAHUN 2024

Penetapan kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Anggaran sebesar dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 21.896.903.296,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.325.692.738,- atau 88,26 persen, yang terdiri atas belanja operasional sebesar Rp. 21.497.404.096,- dan terealisasi Rp. 19.139.942.738,- atau 89,03 persen dan belanja modal sebesar Rp. 399.499.200,- dan realisasi anggaran untuk belanja modal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 185.750.000,- atau mencapai 46,50 persen. Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.5
Pagu Anggaran 2024

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.006.591.496,-
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	262.308.500,-
3.	Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5.944.068.000,-
4.	Program Pengembangan Ekspor	121.650.000,-
5.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	170.160.000,-
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	337.940.000,-
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.222.000,-
8.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	112.670.000,-
9.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	166.556.000,-
10.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	667.175.300,-
11.	Program Pengembangan UMKM	73.562.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Rata-Rata Atas Indikator Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen



Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	11,30%	10,77%	95,31%	Menunjang	Bidang Perdagangan
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	1,30%	0,57%	43,85%	Menunjang	Bidang Perdagangan
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,32	93,07%	Menunjang	Bidang Perdagangan
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	100%	124%	124%	Menunjang	Bidang Perdagangan
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	100%	124%	124%	Menunjang	Bidang Perdagangan
5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	2,25%	2,03%	90,22%	Menunjang	Bidang Perindustrian
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	3%	2,84%	94,67%	Menunjang	Bidang Perindustrian
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80%	76%	95%	Menunjang	Bidang Koperasi
		Persentase Koperasi Sehat	60%	53%	88,33%	Menunjang	Bidang Koperasi
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	500	610	122%	Menunjang	Bidang UMKM
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	100	89	89%	Menunjang	Bidang UMKM



Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Pedagang Informal menjadi Formal tahun 2024 dengan capaian 95,31%, indikator tersebut tidak bisa mencapai target dikarenakan tidak adanya pembangunan gedung pasar pada tahun 2024 sehingga tidak mencapai 100%.
2. Indikator Tingkat Lonjakan Harga pada tahun 2024 mencapai 0,57% dengan capaian 43,85%, harga kebutuhan pokok di kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur sering mengalami turun atau belum stabil. Yang sering mengalami kenaikan adalah beras, minyak telur dan gula.
3. Indikator realisasi ekspor tahun 2024 mencapai 47.589.194,32 dengan capaian 93,07% Secara tahunan, semua sektor meningkat, kecuali pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara bulanan, kenaikan ekspor Oktober ini didorong bungkil sawit.
4. Indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang dapat melampaui target dikarenakan permintaan/pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar dan Perusahaan yang meningkat. Di Kabupaten seruyan dan Katingan masih melakukan pelaksanaan tera pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sehingga pada tahun 2024 2 (dua) indikator tersebut mendapat capaian kinerja sebesar 121,03%
5. Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah mencapai 90,22% dapat melauai kegiatan pameran dagang dan pertemuan bisnis sebagai upaya meningkatkan sekaligus menggalakkan usaha lokal, baik besar, sedang maupun kecil. Sedangkan Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya hanya mencapai 94,67% dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat akan perlunya mencintai produk buatan Industri kecil dan menengah.



6. Indikator Persentase Koperasi Aktif mencapai 95%, untuk meningkatkan Koperasi aktif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan secara rutin menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya.
7. Indikator Persentase Koperasi Sehat pada tahun mencapai 88,33%, Koperasi penting dicek kesehatannya melalui penilaian kesehatan koperasi untuk mengetahui kondisi koperasi tersebut, apakah dalam kondisi cukup sehat, sehat, atau dalam pengawasan. “Keberhasilan memperoleh predikat Koperasi Sehat tidak terlepas dari peran seluruh pengurus dan anggota dalam membangun koperasi.
8. Jumlah Wirausaha baru pada tahun 2024 mencapai 610 dengan capaian 122%, Setiap pengusaha baru diberikan pelatihan kewirausahaan sebagai modal awal ilmu dalam berwirausaha. Lalu dalam perjalanan pengembangan usahanya, mereka juga didampingi oleh pendamping yang memiliki rekam jejak sebagai pengusaha handal di sektornya.
9. Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status Usaha mikro yang mengalami kenaikan status bisa dilihat dari peningkatan pengajuan NIB (Nomor Induk Berusaha). Peningkatan pengajuan NIB ini menunjukkan bahwa minat usaha mikro terus meningkat.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan

Indikator : Persentase Pedagang Informal Menjadi Formal

Menghadapi dinamika perekonomian global yang kian fluktuatif, peningkatan kinerja sektor perdagangan menjadi hal penting yang terus didorong oleh Pemerintah. Fasilitasi perdagangan merupakan upaya yang ditempuh dalam mendorong daya saing nasional dan meningkatkan perdagangan global melalui peningkatan transparansi dan simplifikasi.



Pada sasaran 1 meningkatnya kelembagaan perdagangan, untuk mencapai target Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan harus melakukan pembangunan pasar dan melakukan pendampingan terhadap pedagang informal dan formal.

Upaya untuk pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kelembagaan perdagangan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

Penyempurnaan perangkat peraturan , kebijakan dan pelaksanaan operasional ditujukan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam melaksanakan tata kelola pengelolaan perdagangan dalam negeri khususnya tentang penyelenggaraan pasar.

- b. Kemudahan pengembangan usaha

Kemudahan pengembangan usaha bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan, dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menjalankan usahanya dalam hal pemasaran produk dengan membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil terutama pelaku usaha modern agar dapat memeberikan fasilitas untuk dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- c. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dengan membangun pasar disetiap Kecamatan dan memperbaiki sarana dan prasarana distribusi barang/produk salah satunya ialah sarana



prasarana tradisional yang merupakan salah satu pusat perdagangan yang baik, bersih dan sehat. Tidak ada pembangunan pasar pada tahun 2022 padahal sangatlah penting pembangunan pasar dikarenakan bertujuan untuk menampung pelaku usaha kecil, pelaku usaha besar agar hasil pertanian dan hasil industri yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dipasarkan.

d. Pengawasan Pasar dan Sarana Perdagangan Lainnya

Pengawasan pasar dan sarana perdagangan lainnya bertujuan untuk Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi, mewujudkan kebersihan, keamanan dan ketentraman lingkungan pasar.

e. Pendataan dan Pemungutan Retribusi Pasar

Pendataan dan pemungutan retribusi pasar bertujuan untuk meningkatkan PAD dan akurasi data pasar, mengukur besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengukur besar perkembangan penerimaan dan untuk mengukur jumlah potensi penerimaan retribusi pasar, pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 2.192.427.100,- dengan target Rp. 3.693.112.000,- realisasi 59,37%. sedangkan tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 1.471.104.547,- dengan target Rp. 1.992.187.195,- realisasi capaian 73,84%.

Tabel 3.3
Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Realisasi%
1.	Persentase Pedagang Informal Menjadi Formal	11.30%	10,77%	95,31%

Uraian penjelasan indikator :



Pasar umum menjual barang-barang kebutuhan penduduk baik primer, sekunder, tersier serta barang-barang khusus dan jasa-jasa lainnya. Pasar kaget merupakan pasar sore atau malam yang biasanya menjual makanan dan minuman. Pasar khusus ditentukan dari jenis barang yang diperdagangkan seperti pasar bunga, buah onderdil dan lain lain. Kegiatan pasar merupakan kegiatan perekonomian tradisional yang mempunyai ciri khas adanya sifat tawar menawar antara penjual dan pembeli. Karena sifatnya untuk melayani kebutuhan produk sehari hari, maka lokasinya cenderung mendekati atau berada didaerah pemukiman penduduk sehingga sering muncul pedagang-pedagang yang sebelumnya tidak mempunyai tempat ikut berdagang dipinggiran pasar tersebut yang disebut dengan pedagang kaki lima.

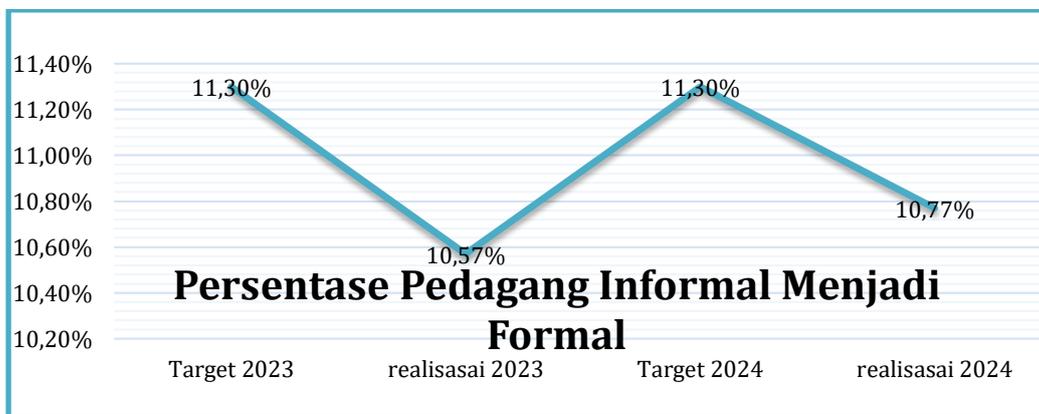
Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah pedagang Kaki Lima (PKL), karena Pedagang Kaki Lima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena itu menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan pedagang formal merupakan pedagang yang sudah menempati kios/los.

Uraian penjelasan Data pendukung Indikator:

Realisasi kinerja pedagang informal menjadi formal pada tahun 2023 sebesar 10,57% dengan capaian 93,54% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10,77% dengan capaian 95,31% bila melihat data tabel diatas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai 90% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran “Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan”

meningkat dibandingkan tahun 2023, meningkatnya capaian tersebut dikarenakan pedagang informal sebagian sudah menempati los dan kios-kios yang sudah disediakan, untuk meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah di sektor perdagangan masih perlu ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis.

Gambar 3.1
Persentase Pedagang Informal Menjadi Formal



Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran 1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	%	$\frac{\text{Jumlah Pedagang Informal} - \text{Jumlah Pedagang formal}}{\text{Jumlah Pedagang}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan

Uraian penjelasan perhitungan pengukuran kinerja dan sumber data:

Perhitungan pengukuran kinerja indikator Persentase Pedagang Informal Menjadi Formal dengan menghitung pedagang informal (pedagang kaki lima) dan menghitung pedagang formal (pedagang yang menempati kios maupun los. Sedangkan sumber datanya dari bidang



perdagangan. Sebagai upaya untuk menciptakan kawasan perdagangan yang tertata dengan baik maka dilakukan pembinaan dan penataan terhadap pedagang kaki lima dan asongan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dilaksanakan Kegiatan penataan kebersihan lingkungan pasar pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100% dan kegiatan pengawasan pasar dan sarana perdagangan lainnya dengan capaian kinerja 100%. Meskipun capaian kinerja sudah hampir tercapai, tetapi baru sebagian kecil pedagang kaki lima dan asongan yang telah mendapatkan pembinaan dan penataan lokasi berdagang. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan penataan perdagangan kaki lima secara berkesinambungan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang tertata dengan baik.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sd. 2024
Indikator Persentase Pedagang Informal

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	10%	9,30%	93%	11,30%	10,57%	93,54%	11,30 %	10,77%	95,31%

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada indikator persentase pedagang informal menjadi formal dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2024 Meningkatkan Kelembagaan Perdagangan dengan indikator Persentase Pedagang Informal menjadi Formal dengan capaian kinerja



95,31%, tidak mencapai 100% karena tidak ada program kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan Gedung pasar.

2. Pada tahun 2024 Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan dengan indikator Persentase Pedagang Informal menjadi Formal dengan capaian kinerja 95,31% lebih tinggi capaian dibandingkan tahun 2023, tidak mencapai 100% karena tidak ada program kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan Gedung pasar.

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024
dengan target jangka menengah**

Tabel. 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Indikator Persentase Pedagang Informal

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	8,00%	10,77%	11,30%	95,31%

Berdasarkan tabel diatas Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis pada indikator persentase pedagang informal menjadi formal dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Tingkat kemajuan Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan adalah 95,31% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 10,77% dan target di 2026 sebesar 11.30%;

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan pedagang kaki lima dan pedagang yang menempati los/kios;



2. Melakukan revitalisasi pasar guna menunjang pasar agar layak ditempati;
3. Mendata pedagang kaki lima yang baru menempati los di pasar.

Faktor-faktor Pendukung Pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu:

1. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pengembangan usaha dan pasar;
2. Sidak dan monitoring secara rutin baik ke pedagang dalam pasar maupun ke toko modern/swalayan;
3. Kesadaran dari pelaku usaha untuk melegalkan usahanya;
4. Adanya kegiatan yang memberikan timbal balik atas pembayaran retribusi pasar dari pedagang di pasar seperti kegiatan pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan sarana perdagangan.
5. Adanya penambahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perdagangan khususnya kegiatan meningkatnya pedagang informal menjadi formal

Faktor Penghambat keberhasilan (Jika indikator kinerja tidak tercapai) yaitu:

1. Anggaran terbatas sehingga pembangunan dan revitalisasi pasar, pembinaan kepada pedagang dalam pasar dan pelaku usaha tidak maksimal;
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk memahami peraturan-peraturan;
3. Kurangnya sarana prasarana di pasar yang di bina Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotawaringin Timur.

Solusi yang diharapkan untuk mengatasi hambatan tersebut diatas :

1. Anggaran yang mencukupi untuk membiayai kegiatan;



2. Melakukan sosialisasi agar pedagang memahami peraturan yang berlaku;
3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan.

Sasaran 2 : Meningkatkan tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang dan jasa

Indikator : Tingkat Lonjakan Harga

Uraian penjelasan sasaran 2 :

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2024 sebesar 0,57 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2024 terhadap Desember 2023) sebesar 56,43%. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi, yaitu: beras, cabai rawit, ikan nila, emas perhiasan, ikan gabus, cabai merah, rimbang/tekokak, ikan kapar, ikan patin dan gula pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap deflasi, yaitu: ikan tongkol/ikan ambu-ambu, bensin, ketimun, semangka, kacang panjang, terong, tomat, nangka muda, daging ayam ras dan labu parang/manis/merah/kuning.

Peningkatan lonjakan harga di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak begitu tinggi dan masih paling rendah daripada di kota lainnya. Namun masih perlu melakukan monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya, untuk meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah di sektor perdagangan dan perlu ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Cara untuk menekan lonjakan harga barang dengan cara :

- a. Pengendalian Inflasi Daerah dan Pasar Penyeimbang

Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah dan Pasar Penyeimbang merupakan upaya untuk mengendalikan ketersediaan stok barang dan harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis, sehingga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis serta



kenaikan harga dapat dimonitoring serta dikendalikan pada tahap yang wajar tidak berlebihan, serta mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan melakukan penimbunan stok barang untuk mendapatkan harga jual yang lebih mahal. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dengan melakukan monitoring ketersediaan stok dan harga kebutuhan bahan pokok secara periodik, serta melibatkan instansi lain baik itu Bulog, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun pihak Kepolisian untuk menjaga ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok. Pada tahun 2024 tidak ketersediaan dana dalam mendukung program/kegiatan operasi pasar murah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa masyarakat saat ini memerlukan perhatian dari pemerintah dalam rangka meringankan beban hidup guna memenuhi kebutuhan pokoknya. Apalagi ada kebiasaan harga barang kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan disaat hari besar keagamaan termasuk di bulan Ramadhan Tahun 2024.

b. Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya

Kegiatan Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya merupakan upaya untuk mengendalikan ketersediaan stok barang dan harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis, sehingga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis serta kenaikan harga dapat dimonitoring dan dikendalikan pada tahap yang wajar tidak berlebihan, mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan melakukan penimbunan stok barang untuk mendapatkan harga jual yang lebih mahal. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan



Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dengan melakukan monitoring ketersediaan stok dan harga kebutuhan bahan pokok secara periodik, serta melibatkan instansi lain baik itu Bulog, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun pihak Kepolisian untuk menjaga ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok. Pada tahun 2024 telah dilakukan monitoring sebanyak 265 kali di beberapa pasar tradisional di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

c. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk mengurangi penggunaan dan peredaran produk impor di dalam negeri serta masyarakat dapat lebih mencintai terhadap produk dalam negeri, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada neraca perdagangan dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur berkerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi melakukan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri 130 orang dengan target sasaran peserta ialah pelaku usaha, bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kecintaan penggunaan produk dalam negeri. Sehingga lebih peduli terhadap penggunaan produk dalam negeri dan dapat membantu menyebar luaskan penggunaan produk dalam negeri.



Tabel 3.7
Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	2024		
		Target	Realisasi	Realisasi%
2.	Tingkat Lonjakan Harga	1,30%	0,57%	43,85%

Uraian penjelasan indikator :

Kenaikan harga sembako memang sudah menjadi trend pada waktu tertentu seperti pada menjelang Ramadan dan Lebaran, serta Natal dan Tahun Baru. Kenaikan ini terjadi lantaran kebutuhan masyarakat yang meningkat, dengan kenaikan sekitar 10-15 persen. Tren kenaikan harga kebutuhan pokok terus berlanjut. Sampai Desember 2024, komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar, baik secara bulanan maupun tahunan. Menjelang hari besar keagamaan barang barang mahal asumsi ini mendorong masyarakat untuk melakukan aksi beli dalam skala besar sebagai stok untuk mencukupi kebutuhan saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini, biaya distribusi mempengaruhi harga barang hingga 21% lebih.

Melakukan edukasi kepada konsumen terkait asumsi yang sering kali berkembang bahwa setiap kali menjelang hari besar keagamaan 'pasti barang barang mahal. Asumsi ini mendorong mereka untuk melakukan aksi beli dalam skala besar sebagai stok untuk mencukupi kebutuhan saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Hal ini bila tidak disikapi dengan menjaga ketersediaan barang dan alur distribusi akan menimbulkan masalah kelangkaan barang, menambahkan, para pedagang pasar tradisional juga siap bekerja sama dengan Pemerintah baik di pusat maupun daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok ini. Maka subsidi distribusi dan pemangkasan jalur distribusi dapat mengurangi lonjakan harga. Untuk mewujudkan itu semua, sekali lagi

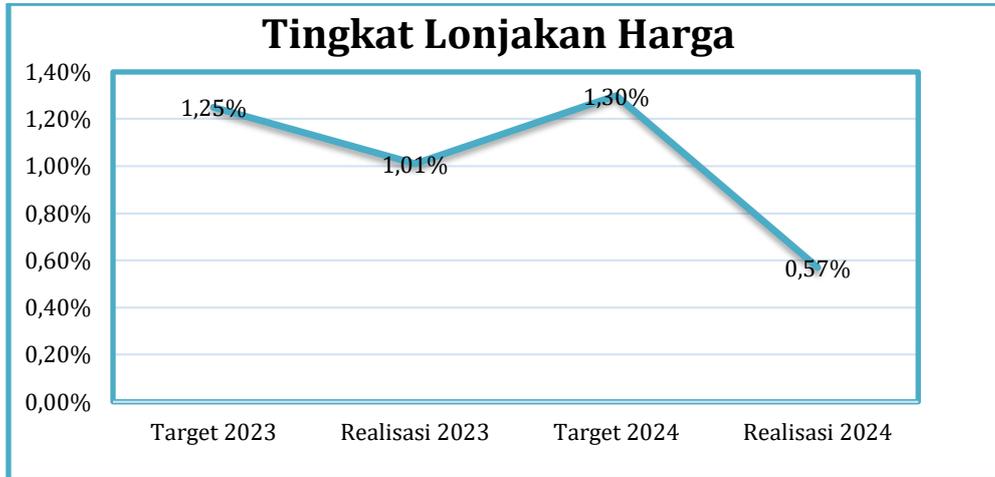


pemerintah harus duduk bersama agar bisa memangkas rantai distribusi barang yang cukup Panjang.

Uraian penjelasan data pendukung indikator :

Perhitungan pengukuran kinerja indikator Tingkat Lonjakan Harga dengan menghitung hasil dari monitoring harga sembako selama satu tahun. Kegiatan Monitoring Harga Pasar dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pelaku usaha maupun masyarakat konsumen yang membutuhkan informasi resmi terhadap dunia usaha maupun informasi tentang harga -harga barang kebutuhan masyarakat terutama sekali kebutuhan pokok baik harga eceran maupun harga borongan. Dengan melakukan kegiatan ini, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui harga barang kebutuhan yang akan mereka beli. Pelaksanaan monitoring harga sembako dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam seminggu di Pasar Keramat dan Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM). Hasil dari data monitoring direkap dan setelah itu dikirim ke Provinsi dan Kementerian Perdagangan. Sebagai upaya untuk menekan lonjakan harga maka dilakukan pembinaan dan penataan terhadap para pedagang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya.

Gambar 3.2
Tingkat Lonjakan Harga



Realisasi kinerja Tingkat Lonjakan Harga pada tahun 2023 sebesar 1,01% dengan capaian 80,80% pada tahun 2024 sebesar 0,57% dengan capaian 43,85% bila melihat data tabel diatas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai hampir 40% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran “Tingkat Lonjakan Harga” kurang baik. Inflasi di Kota Sampit terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,40 persen); kelompok pakaian dan alas kaki (0,11 persen); kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,08 persen); kelompok kesehatan (0,01 persen); kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,12 persen); dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,61 persen).



Tabel. 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran 2
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	%	$\frac{\text{Harga thn } (n) - \text{Harga thn } (n - 1)}{\text{Harga thn } (n)} \times 100\%$		Bidang Perdagangan

Uraian penjelasan perhitungan pengukuran kinerja dan sumber data:

Perhitungan pengukuran kinerja indikator Tingkat Lonjakan Harga dengan menghitung hasil dari monitoring harga sembako selama satu tahun tahun 2024 dan realisasi tahun 2023. Sedangkan sumber datanya berasal dari bidang perdagangan. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sd. 2024
Indikator Tingkat Lonjakan Harga

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	1,25%	0,28%	22%	1,25%	1,01%	80,80%	1,30%	0,57%	43,85%



Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Indikator Tingkat Lonjakan Harga dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2022 Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa dengan indikator Tingkat Lonjakan Harga, mendapatkan capaian kinerja sebesar 22,40% dengan Tingkat lonjakan harga 0,28%. Terjadinya peningkatan harga kebutuhan pokok.
2. Pada tahun 2023 Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa dengan indikator Tingkat Lonjakan Harga, mendapatkan capaian kinerja sebesar 80,80% dengan Tingkat lonjakan harga 1,01%. Penekanan inflasi daerah dilakukan dengan cara pelaksanaan pasar murah dan pasar penyeimbang.
3. Pada tahun 2024 Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa dengan indikator Tingkat Lonjakan Harga, mendapatkan capaian kinerja sebesar 43,85% dengan Tingkat lonjakan harga 0,57%. Kenaikan barang kebutuhan pokok tidak naik secara signifikan seperti tahun 2023.

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024
dengan target jangka menengah**

Tabel 3.10
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Indikator Tingkat Lonjakan Harga

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	0,99%	0,57%	1,30%	43,85%



Berdasarkan tabel diatas Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis pada indikator Tingkat Lonjakan Harga dapat di uraikan sebagai berikut :

- ❖ Tingkat kemajuan Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa adalah 43,85% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 0,57% dan target di 2026 sebesar 1,30%;

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pasar murah menjelang lebaran dan natal;
2. Pelaksanaan pasar penyeimbang;
3. Pelaksanaan monitoring harga sembako;

Faktor Pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu :

1. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung seperti pasar murah, dan pasar penyeimbang untuk menekan tingkat lonjakan harga;
2. Sidak dan monitoring harga sembako dan bahan penting lainnya secara rutin baik ke pedagang dalam pasar maupun ke toko modern/swalayan;
3. Kesadaran dari pelaku usaha untuk tidak menimbun barang;
4. Pasokan sembako dan barang penting lainnya mencukupi.

Faktor Penghambat keberhasilan (Jika indikator kinerja tidak tercapai):

1. Anggaran terbatas sehingga pelaksanaan pasar murah dan pasar penyeimbang tidak terlaksana;
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk memahami peraturan-peraturan;
3. Pelaku usaha menimbun barang .

Untuk mempertahankan dan meningkta kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan kinerja dimasa mendatang antara lain :



1. Menambah stok beras dan minyak goreng pada pelaksanaan pasar penyeimbang;
2. Menambahkan bahan pokok selain beras dan minyak goreng pada pelaksanaan kegiatan pasar murah;
3. Menambah jumlah paket dan kawasan pada saat pasar murah;
4. Menambah Anggaran yang mencukupi untuk membiayai kegiatan;
5. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan.

Sasaran 3 : Meningkatkan Nilai Ekspor

Indikator : Realisasi Ekspor

Uraian penjelasan sasaran 3 :

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka Panjang. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kauntitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan Pendapatan Nasional dalam satu tahun sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan nilai ekspor di wilayah Kotawaringin Timur dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dokumen ekspor dan impor;
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan import ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha



usaha di bidang ekspor dan impor di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap peraturan dan kebijakan pengurusan dokumen ekspor dan impor yang sering mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

b. Pengembangan data base informasi potensi unggulan;

Ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki produk potensi unggulan ekspor, sehingga tersedianya data base informasi potensi produk unggulan ekspor dapat meningkatkan nilai pertumbuhan ekspor dan memudahkan informasi tentang pasar tujuan ekspor.

c. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha.

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kendala yang menjadi penghambat untuk melakukan ekspor produk dari Kabupaten Kotawaringin Timur ke luar negeri serta peluang pasar tujuan ekspor baru yang dapat di intervensi oleh para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya didominasi oleh cangkang sawit saja tetapi komoditas lainnya.

d. Pelatihan ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi

Kegiatan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha industri kecil, usaha mikro kecil dan koperasi bertujuan agar para pelaku usaha kecil dan koperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki produk unggulan ekspor dapat memahammi tata cara pengurusan dokumen ekspor serta memahami mekanisme ekspor. Sehingga kedepannya muncul eksportir baru yang dapat melakukan ekspor produknya sendiri tanpa melalui perantara.



Tabel 3.11
Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian%
3.	Realisasi Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,32,-	93,07%

Uraian penjelasan indikator :

Pada tahun 2024 sebesar \$ 53.849.355,00,- dengan target 51.132.970,56,- realisasi capaian kinerja 105,31%, laporan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA). Peningkatan ekspor baik jumlah maupun jenis barang atau jasa serta nilainya selalu diupayakan atau digalakkan dengan berbagai strategi diantaranya adalah kebijakan pengembangan ekspor, terutama ekspor nonmigas, baik barang maupun jasa. Tujuan dari program pengembangan ekspor ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Tantangan pokok dalam kebijakan perdagangan adalah mengembalikan keterkaitan perdagangan dengan pertumbuhan dan pembangunan. Banyak pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan tidak de-ngan sendirinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan tersebut merupakan hasil kerja iekstraî pemerintah yang pada dasarnya *ibeyond liberizationî*.

Melakukan secara proaktif negosiasi dan Kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional. Kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia selain ditujukan untuk meningkatkan daya saing global produk Indonesia, juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menambah

cadangan devisa. Dengan adanya deregulasi perdagangan luar negeri, diharapkan adanya peningkatan ekspor produk Indonesia, baik dari volume maupun nilai-nya

Uraian penjelasan data pendukung indikator :

Indikator realisasi ekspor berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA). Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengeksport. Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO / SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

Gambar 3.3
Realisasi Ekspor



Pertumbuhan nilai ekspor itu sendiri pada tahun 2023 mencapai \$ 53.849.355,00,- dengan target 51,132,970.56,- realisasi capaian kinerja 105,31%, sedangkan tahun 2024 sebesar \$ 47.589.194,32,- dengan target 51.132.970,56,- realisasi capaian kinerja 93,07%, pada tahun 2024 laporan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) sedangkan pada tahun



2023 berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Bea Cukai Sampit. Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Realisasi Ekspor	\$	Jumlah Realisasi Ekspor	Bidang Perdagangan

Uraian penjelasan perhitungan pengukuran kinerja dan sumber data:

Realisasi ekspor pada tahun 2024 cara menghitungnya berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang berasal dari tahun 2024, dan sumber data berasal dari bidang perdagangan. Pada tahun 2024 laporan ekspor dari Bea Cukai tidak ada memberikan laporan realisasi ekspor.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sd. 2024
Indikator Realisasi Ekspor

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Nilai Ekspor	Realisasi Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 97.090.929,27	189,88%	\$ 51.132.970,56	\$ 53.849.355,00	105,31%	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,32	93,07%

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Indikator Realisasi Ekspor dapat di uraikan sebagai berikut :



1. Pada tahun 2022 sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor dengan indikator Realisasi Ekspor mencapai 189,88% melampaui dari target yang ditetapkan;
2. Pada tahun 2023 sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor dengan indikator Meningkatnya Realisasi Ekspor mencapai 105,31% melampaui dari target yang ditetapkan;
3. Pada tahun 2024 sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor dengan indikator Meningkatnya Realisasi Ekspor mencapai 93,07%, capaian pada tahun ini tidak dapat melampaui target dari 2 (dua) tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun ini nilai ekspor hanya berdasarkan dari Surat Keterangan Asal (SKA).

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024
dengan target jangka menengah**

**Tabel 3.14
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Indikator Realisasi Ekspor**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatnya Nilai Ekspor	Realisasi Ekspor	\$ 51.242.970,29	\$ 47.589.194,32	\$ 51.132.970,56	93,07%

Berdasarkan tabel diatas Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis pada indikator Realisasi Ekspor dapat di uraikan sebagai berikut :

- ❖ Tingkat kemajuan Nilai Ekspor \$ 47.589.194,32 adalah dengan capaian sebesar 93,07% dan target di 2026 sebesar \$ 51.132.970,56;

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kineja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :



Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dokumen ekspor dan impor.
2. Pengembangan data base informasi potensi unggulan;
3. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha.
4. Promosi produk unggulan untuk mengenalkan produk unggulan daerah.

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu:

1. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung ekspor impor;
2. Adanya pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan;
3. Sosialisasi tentang kegiatan pemasaran dan tata cara ekspor.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan kinerja dimasa mendatang antara lain:

1. Melaksanakan promosi produk unggulan daerah;
2. Melakukan sosialisaso untuk para pelaku usaha belum memiliki kemampuan untuk melakukan pemasaran secara online, sementara budaya belanja semakin beralih dari konvensional ke online;
3. Memperluas peluang pasar produk Kotim, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai.



Sasaran 4 : Meningkatnya Tertib Ukur

Indikator :	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku
Indikator :	Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang

Uraian Penjelasan Sasaran 4 :

Mewujudkan sasaran Meningkatnya Tertib Ukur terkait dengan indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan indikator Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang tujuannya meningkatkan kinerja metrologi legal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan upaya untuk mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kepedulian dalam ketertiban serta kepatuhan untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen terhadap kepastian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan sesuai ukuran yang seharusnya. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran, penakaran, massa atau penimbangan terhadap kualitas atau kuantitas dan dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan upaya yang dilakukan antara lain :

a. Sosialisasi tentang Kemetrologian

Upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP dan BDKT sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan kepada konsumen, dilakukan sosialisasi tentang peraturan, kebijakan dan



peran kemetrolgian dalam meningkatkan perdagangan dalam negeri. Pada tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi yang berasal dari pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut masih banyak pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah sendiri belum mengerti serta paham tentang apa itu kemetrolgian dan kenapa mesti melakukan tera dan tera ulang alat UTTP. Sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang diperlukan strategi lain yang lebih efektif dan masif untuk menyampaikan informasi tentang kemetrolgian.

b. Pengawasan Kemetrolgian

Pengawasan kemetrolgian merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim usaha yang tertib ukur sehingga dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan tahun 2023 masih banyak pelaku usaha yang tidak taat terhadap kewajiban untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP serta pelaku usaha yang berbuat curang dengan merusak segel tanda tera dengan sengaja untuk memperdaya ukuran pada alat UTTP yang sudah ditera maupun tera ulang. Diperlukan strategi dan upaya yang lebih keras lagi dalam hal pengawasan untuk mewujudkan peningkatan perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen yang tertib ukur.

Tabel 3.15
Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian%
4.	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	100%	124%	124%
5.	Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang	100%	124%	124%

Uraian penjelasan indikator:

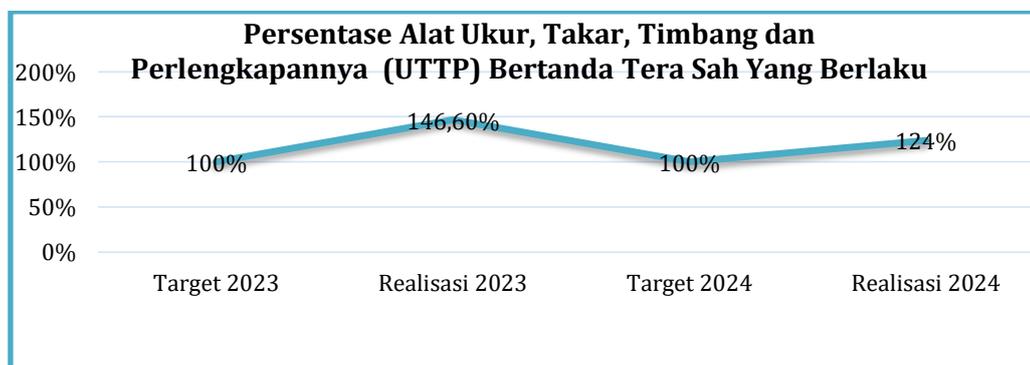
Pada tahun 2024 Pelayanan tera/ tera ulang pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya mencapai 3.100 UTTP dengan target 2.500 UTTP, sehingga tahun 2024 target Indikator Kinerja Sasaran Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dengan realisasi kinerja mencapai 146,60% dan untuk Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang dengan realisasi kinerja 124%.

Uraian penjelasan data pendukung indikator :

Indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan indikator Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang data pendukungnya berasal dari data pelaksanaan Tera dan tera ulang di pasar-pasar dan perusahaan.

Gambar 3.4

Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku



Gambar 3.5
Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang



Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha tertib ukur pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang digunakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur, sudah sepenuhnya dapat diwujudkan dikarenakan urusan kemetrolagian pada tahun 2018 sudah dilimpahkan ke Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2018. Pada tahun 2020 para wajib tera di Kabupaten Seruyan melakukan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 Pada 16 November 2021 Indikator Kinerja Sasaran Persentase Produk Yang Bersertifikat diganti dengan Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Produk Yang Bersertifikat diganti dengan Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dikarenakan untuk memudahkan dalam mengukur indikator tersebut.

Pelayanan tera/ tera ulang pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya mencapai 3.516 UTTP dengan target 2.500 UTTP,



sehingga tahun 2023 target Indikator Kinerja Sasaran Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dengan realisasi kinerja mencapai 146,60% dan untuk Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang dengan realisasi kinerja 146,60%. Sedangkan pada tahun 2024 Pelayanan tera/ tera ulang pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya mencapai 3.100 UTTP dengan target 2.500 UTTP, sehingga tahun 2024 target Indikator Kinerja Sasaran Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dengan realisasi kinerja mencapai 124% dan untuk Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang dengan realisasi kinerja 124%.

Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku}} \times 100\%$	Bidang Metrologi Legal
		Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	%	$\frac{\text{Jumlah Alat UTTP yang sudah ditera}}{\text{Jumlah seluruh alat IITTP}} \times 100\%$	Bidang Metrologi Legal

Uraian Penjelasan perhitungan pengukuran kinerja dan sumber data :

Indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku cara menghitung pengukuran kinerja dengan cara jumlah UTTP bertanda tera san yang berlaku dibagi jumlah UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berberlaku dan indikator Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang cara menghitungnya adalah jumlah UTTP yang sudah ditera dan jumlah



seluruh UTTP, data pendukungnya berasal dari data pelaksanaan Tera dan tera ulang di pasar-pasar dan perusahaan sedangkan sumber datanya berasal dari Metrologi Legal.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd. 2023

Indikator :

- 1. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku**
- 2. Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	100%	207,93%	208%	100%	146,60%	146,60%	100%	124%	124%
		Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	100%	207,93%	208%	100%	146,60%	146,60%	100%	124%	124%

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan Indikator Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2022 Sasaran Meningkatnya Tertib Ukur terdiri dari 2 (dua) indikator yang pertama Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan yang



kedua Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang mencapai 189,88%. Kabupaten seruyan dan Katingan melakukan tera dan tera ulang di Kotawaringin Timur.

2. Pada tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Tertib Ukur terdiri dari 2 (dua) indikator yang pertama Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan yang kedua Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang mencapai 146,60%. Kabupaten seruyan dan Katingan melakukan tera dan tera ulang di Kotawaringin Timur.
3. Pada tahun 2024 Sasaran Meningkatnya Tertib Ukur terdiri dari 2 (dua) indikator yang pertama Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan yang kedua Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang mencapai 124%. Kabupaten seruyan dan Katingan melakukan tera dan tera ulang di Kotawaringin Timur.

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024
dengan target jangka menengah**

**Tabel 3.18
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

Indikator :

- 1. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku**
- 2. Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	152,87%	124%	100%	124%
		Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	152,87%	124%	100%	124%



Berdasarkan tabel diatas Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis pada indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan Indikator Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang dapat di uraikan sebagai berikut :

- ❖ Tingkat kemajuan Meningkatnya Tertib Ukur adalah 124% dengan capaian di tahun 2024 Tingkat kemajuan Meningkatnya Tertib Ukur adalah 124% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 124% dan target di 2026 sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

a. Sosialisasi tentang Kemetrolagian

Upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP dan BDKT sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan kepada konsumen, dilakukan sosialisasi tentang peraturan, kebijakan dan peran kemetrolagian dalam meningkatkan perdagangan dalam negeri. Pada tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi yang berasal dari pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut masih banyak pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah sendiri belum mengerti serta paham tentang apa itu kemetrolagian dan kenapa mesti melakukan tera dan tera ulang alat UTTP. Sehingga untuk tahun-



tahun yang akan datang diperlukan strategi lain yang lebih efektif dan masif untuk menyampaikan informasi tentang kemetrolagian.

b. Pengawasan Kemetrolagian

Pengawasan kemetrolagian merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim usaha yang tertib ukur sehingga dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan tahun 2023 masih banyak pelaku usaha yang tidak taat terhadap kewajiban untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP serta pelaku usaha yang berbuat curang dengan merusak segel tanda tera dengan sengaja untuk memperdaya ukuran pada alat UTTP yang sudah ditera maupun tera ulang. Diperlukan strategi dan upaya yang lebih keras lagi dalam hal pengawasan untuk mewujudkan peningkatan perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen yang tertib ukur.

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu :

1. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untung menunjang kegiatan pelayanan Tera dan Tera ulang UTTP;
2. Pengawasan terhadap wajib tera terkait pelaksanaan Tera, tera Ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
3. Penyuluhan pada saat siding Tera, tera Ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
4. Adanya penambahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kemetrolagian khususnya kegiatan tera ulang.



Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan kinerja dimasa mendatang antar lain:

1. Menambah anggaran sehingga pelayanan tera dan tera ulang maksimal;
2. Mengadakan sosialisasi ke pelaku usaha untuk memahami peraturan-peraturan.
3. Melaksanakan pengawasan disetiap kegiatan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang;
4. Menambah sarana prasarana yang menunjang kegiatan ketrologian.

Sasaran 5 : Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Indikator :	Persentase Kenaikan Status Industri dari Kecil Menjadi Menengah
Indikator :	Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya

Uraian penjelasan sasaran 5 :

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah yang berdaya saing yaitu melalui strategi peningkatan daya saing industri kecil serta penguatan sentra dan kluster sebagai modal menembus pasar global, dan juga pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi wilayah dalam mendukung sektor pariwisata. Sedangkan kebijakannya yakni dengan Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah melalui peningkatan kemampuan teknologi industri, penguatan sumber daya manusia, perluasan pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan juga pengemban. Faktor Penghambat keberhasilan sasaran adalah:

1. Kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku terutama bahan baku impor, misalnya: China sebagai pemasok bahan baku bagi Industri mengalami pembatasan ekspor sehingga produsen kesulitan bahan



baku Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses produksi pelaku usaha sektor industri yang tergantung pada bahan baku impor;

2. Menurunnya omset selama pandemi corona mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri Proses produksi sebagian IKM tidak dapat dilakukan karena biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, energi) tidak dapat dipenuhi;
3. Industri kecil yang jumlahnya mendominasi sektor industri di Sampit, di era perdagangan bebas ini dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat sementara mereka memiliki berbagai keterbatasan. Bahan baku IKM tertentu belum bisa dipenuhi secara mandiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah lain. Kualitas sumber daya manusia IKM dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, standarisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM yang merupakan syarat untuk menembus pasar global masih lemah;

Pengembangan IKM didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat terintegrasi secara optimal. Selain itu kemitraan antara industri kecil dengan industri besar atau pemilik sumber pemodalannya masih perlu ditingkatkan, gan sentra dan kluster industri.

Tabel 3.19
Capaian Target dan realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian%
6.	Persentase Kenaikan Status Industri dari Kecil Menjadi Menengah	2,25%	2,03%	90,22%
7.	Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	3%	2,84%	94,67%



Uraian Penjelasan Indikator :

Pada tahun 2024 indikator kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah realisasinya 2,03% capaian 90,22%, sedangkan untuk indikator IKM yang meningkat omzetnya realisasinya mencapai 2,84% dengan capaian 94,67%. Pembangunan industri saat ini bukan hanya merupakan suatu potensi yang hanya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi harus mampu memberikan kontribusi yang besar kearah modernisasi kehidupan masyarakat dalam menunjang pembentukan daya saing nasional. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka menengah bukan hanya sekedar untuk mengatasi permasalahan pokok dan kelemahan di sektor industri saja yang disebabkan oleh :

- 1) Ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponennya.
- 2) Keterkaitan antara sektor industri dan dengan sektor ekonomi lainnya yang relatif masih lemah.
- 3) Struktur industri yang hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek.
- 4) Ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri.
- 5) Lebih dari 60 % kegiatan sektor industri terletak di Pulau Jawa.
- 6) Masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian, tetapi juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional yang meliputi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, lemahnya sektor infrastruktur, tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dimana pembangunan industri untuk lima tahun kedepan, pemerintah telah



menyusun kebijakan pembangunan industri nasional yang komprehensif dan disepakati seluruh potensi bangsa agar segera dapat mewujudkan terbangunnya industri nasional yang tangguh dan maju dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Dalam kebijakan tersebut diperlukan dalam pembangunan industri secara terintegritas dan sinergi diantara pemangku kepentingan utamanya pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha dalam pembangunan daya saing, membangun kerjasama pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kompetensi inti daerah disektor industri antara lain melalui pembangunan kawasan industri serta membangun potensi inti tersebut berdasarkan keunggulan komparatif.

Uraian penjelasan data pendukung indikator:

Indikator persentase Kenaikan Status Industri dari Kecil Menjadi Menengah dan indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya data pendukung berdasarkan data Industri Kecil dan Menengah melalui hasil dari pendataan pelaku usaha dan data berdasarkan Sistem Informasi Industri Nasional (SINNas).

Tabel 3.20
Pengukuran Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Timur

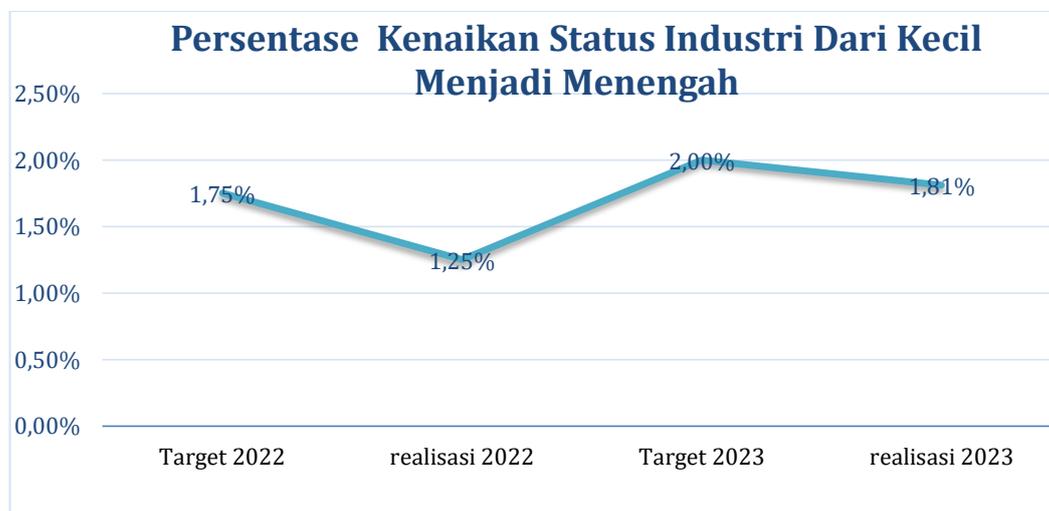
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	%	$\frac{\text{Jumlah Industri Kecil} - \text{Jumlah Industri Menengah}}{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian
		Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya	%	$\frac{\text{Omzet IKM tahun } (n)}{\text{Omzet IKM tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Bidang Perindustrian



Uraian penjelasan perhitungan pengukuran kinerja dan sumber data :

Indikator persentase Kenaikan Status Industri dari Kecil Menjadi Menengah dan indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya data pendukung berdasarkan data Industri Kecil dan Menengah melalui hasil dari pendataan pelaku usaha dan data berdasarkan Sistem Informasi Industri Nasional (SINNas). Sumber data berasal dari bidang perindustrian.

Gambar 3.6
Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah



Gambar 3.7
Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya





Melihat pada ilustrasi pada tabel diatas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai dari 90% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian indikator kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah pada tahun 2022 realisasinya 1,75 capaian 85,71%, sedangkan untuk indikator IKM yang meningkat omzetnya realisasinya mencapai 2,10% dengan capaian 84%. Sedangkan untuk tahun 2023 indikator kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah realisasinya 1,81% capaian 90,50%, sedangkan untuk indikator IKM yang meningkat omzetnya realisasinya mencapai 2,25% dengan capaian 90%. Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan industri di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sd. 2024

Indikator :

- 1. Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah**
- 2. Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya**

No.	Tujua/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2022			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkat nya Pertumbuh an Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	1,75%	1,50%	86%	2%	1,75%	87,50%	2,25%	2,03%	90,22%
		Persentase IKM yang Meningkat Omzetnya	2,50%	2,10%	84%	2,50%	2,25%	90,00%	3%	2,84%	94,67%

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Indikator Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah dan



Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah dan indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya tidak mencapai target dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap barang produksi industri;
2. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah dan indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya tidak mencapai target dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap barang produksi industri;
3. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah dan indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya tidak mencapai target dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap barang produksi industri dan kurang promosi produk unggulan daerah.

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024
dengan target jangka menengah**

**Tabel 3.22
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

Indikator :

1. Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah
2. Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	1,50%	2,03%	2,50%	81,2%
		Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya	2,10%	2,84%	3,50%	81,14%



Berdasarkan tabel diatas Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis pada Indikator Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah dan Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Tingkat kemajuan Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah untuk indikator Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah adalah 2,50% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 81,2% dan target di 2026 sebesar 2,50% sedangkan untuk indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya adalah 2,84% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 81,14% dan target di 2026 sebesar 3,50%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan industri kecil dan menengah bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk industri kecil di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur salah satunya industri kecil di bidang olahan makanan/minuman dan hasil hutan dan perkebunan yang merupakan salah satu industri kecil unggulan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam meningkatkan daya saing kualitas dan daya saing produk industri kecil dilakukan upaya kegiatan Bimtek dan Manajemen Usaha

b. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

Peningkatan kemampuan teknologi industri dalam upaya meningkatkan kemampuan para pelaku industri kecil di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat meningkatkan kemampuan dan



keterampilannya dalam menggunakan teknologi industri sehingga dapat meningkatkan produksi produk menjadi lebih efektif dan kualitas yang memiliki daya saing. Pada tahun 2022 telah dilakukan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna di Bidang Agro bagi industri kecil yang bergerak pada pengolahan kelapa hasil perkebunan dan pelatihan menjahit pakaian etnik.

c. Pengembangan Wilayah dan Akses Industri

Pengembangan Wilayah dan Akses Industri dalam upaya meningkatkan kemampuan para pelaku industri kecil di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam menggunakan teknologi industri sehingga dapat meningkatkan produksi produk menjadi lebih efektif dan kualitas yang memiliki daya saing. Pada tahun 2023 telah dilakukan Kegiatan Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Sentra IKM bagi industri kecil dan menengah untuk menampung hasil industri untuk dipamerkan pada acara-acara pameran.

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu:

1. Pemutusan hubungan kerja akibat penurunan kinerja berbagai sektor akibat adanya pandemi Covid-19, berdampak pada tumbuhnya wirausaha baru sektor industri. Tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagian beralih profesi menjadi pelaku usaha sektor industri walaupun dengan skala mikro dan kecil. Komoditi yang mereka produksi diantaranya olahan makanan dan minuman serta masker;
2. Kinerja sektor industri juga didukung adanya berbagai kegiatan pelatihan produksi dan pemasaran yang didanai dari APBN khususnya dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM;



3. Tumbuh dan berkembangnya media pemasaran online serta berubahnya budaya belanja masyarakat yang dipercepat dengan pandemi Covid-19, mendorong kinerja sektor industri pengolahan. Peningkatan transaksi perdagangan online tentu berdampak pada peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan;
4. Maraknya bisnis online, dan tetap adanya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor memicu kinerja sektor industri;
5. Pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya juga memicu peningkatan kinerja sektor industri.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan kinerja dimasa mendatang antara lain:

1. Membuat strategi baru tentang pemasaran dan penjualan baik secara online dan offline di era new normal. Dampak globalisasi menyebabkan persaingan ketat dalam import ekspor barang dan jasa, sehingga pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran rakyat tercapai secara merata.
2. Isue yang berkembang adalah upaya meningkatkan kemandirian IKM masa yang akan datang, perlu strategi baru dalam membangun hubungan antara IKM dengan Bank. Agar tujuan pemerataan ekonomi terlaksana perlu kebijakan pemerintah dalam mengatur regulasi pertumbuhan usaha IKM dan percepatan perwujudan kemandirian usaha masyarakat, peran serta pemerintah dalam mendukung pertumbuhan IKM modern perlu dituangkan dalam peraturan yang baru agar pemerataan ekonomi segera terwujud.
3. Menambah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Pelatihan untuk pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah.



Sasaran 6 : Meningkatnya pendapatan anggota koperasi

Indikator :	Persentase Koperasi Aktif
Indikator :	Persentase Koperasi Sehat

Meningkatkan pendapatan koperasi adalah hal penting demi menjaga eksistensi dan kesejahteraan anggotanya. Metode yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan koperasi dalam pengabdian ini adalah dengan memberikan pemahaman atau edukasi kepada para nasabah dan calon nasabah tentang pentingnya menabung serta menerapkan biaya tambahan berupa simpanan wajib bagi peminjam. Pemberian edukasi kepada nasabah dan calon nasabah tentang pentingnya menabung dilakukan agar minat menabung nasabah meningkat sehingga bisa menghasilkan perputaran uang yang optimal karena dilihat dari jumlah permintaan kredit yang tinggi dibandingkan dengan tingkat menabung yang rendah, selain itu kegiatan ini juga bisa mendatangkan nasabah baru. Serta menerapkan biaya tambahan berupa simpanan wajib bagi peminjam dilakukan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan nasabah dalam melunasi pinjamannya. Simpanan wajib peminjam ini bisa menjadi hak nasabah jika nasabah mampu melunasi pinjamannya dengan tepat waktu. Sebaliknya jika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya dengan tepat waktu maka akan menjadi hak koperasi. Peningkatan pendapatan di Koperasi berhasil dijalankan dengan kegiatan memberikan pemahaman atau edukasi kepada nasabah dan calon nasabah serta menerapkan simpanan wajib bagi peminjam.

Koperasi penting dicek kesehatannya melalui penilaian kesehatan koperasi untuk mengetahui kondisi koperasi tersebut, apakah dalam kondisi cukup sehat, sehat, atau dalam pengawasan. "Keberhasilan memperoleh predikat Koperasi Sehat tidak terlepas dari peran seluruh pengurus dan anggota dalam membangun koperasi Koperasi aktif adalah koperasi yang secara rutin mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan



orang-orang atau badan hukum koperasi. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya atau bermotif pelayanan kepada para anggotanya
Kriteria koperasi aktif:

- Mengadakan RAT secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir
- Melaksanakan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya

Uraian penjelasan Data pendukung Indikator:

Realisasi kinerja Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2023 sebesar 93% dengan capaian 93% pada tahun 2024 sebesar 10,57% dengan capaian 93.54%, sedangkan realisasi kinerja Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2023 sebesar 93% dengan capaian 93% pada tahun 2024 sebesar 10,57% bila melihat data tabel diatas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai 90% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran “Meningkatnya pendapatan anggota koperasi” meningkat dibandingkan tahun 2023, Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis.

Tabel 3.23
Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian%
8.	Persentase Koperasi Aktif	80%	76%	95%
9.	Persentase Koperasi Sehat	60%	53%	88,33%

Uraian Penjelasan Indikator :

Pada tahun 2024 indikator persentase koperasi aktif realisasinya 76% capaian 95%, sedangkan untuk indikator IKM yang meningkat omzetnya realisasinya mencapai 2,25% dengan capaian 90%. Koperasi adalah merupakan lembaga keuangan yang dalam pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jumlah koperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 adalah sebanyak 599. Koperasi aktif adalah

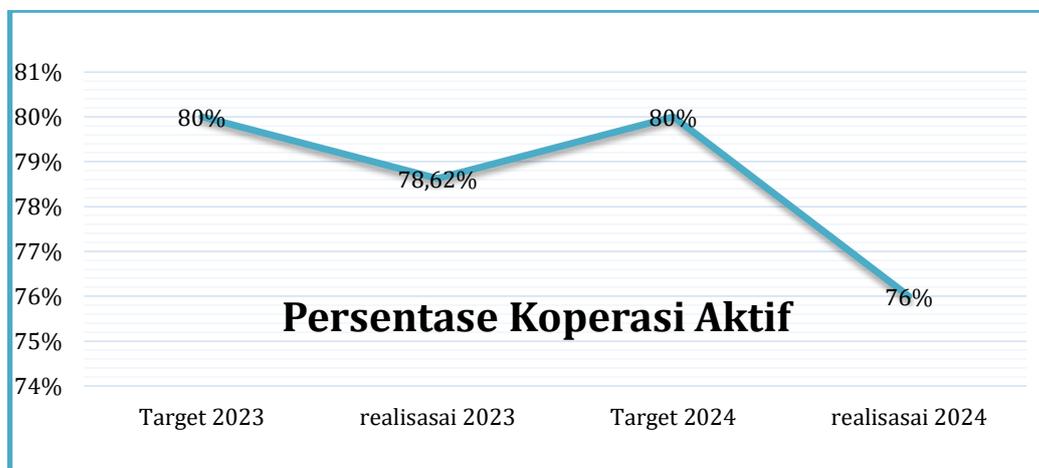


koperasi yang melaksanakan operasional untuk melayani kebutuhan anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi sebanyak 531 dan tidak aktif sebanyak 68 koperasi. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh 2 (Dua) Program yaitu Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam dan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua). Jumlah anggaran sebesar Rp. 279.226.000,- realisasi sebesar Rp. 265.291.590,-. Capaian kinerja keuangan sebesar 95,01%. Realisasi capaian kinerja di bawah target yang telah ditetapkan dipengaruhi berbagai faktor diantaranya adalah tidak adanya perubahan koperasi yang tidak aktif menjadi aktif serta masih adanya sedikit pengaruh kurangnya pemahaman bagi anggota koperasi sehingga masih sedikit mempengaruhi kegiatan operasional koperasi yang membuat sejumlah koperasi kesulitan keuangan yang pada akhirnya membuat mereka tidak bisa menggelar RAT.

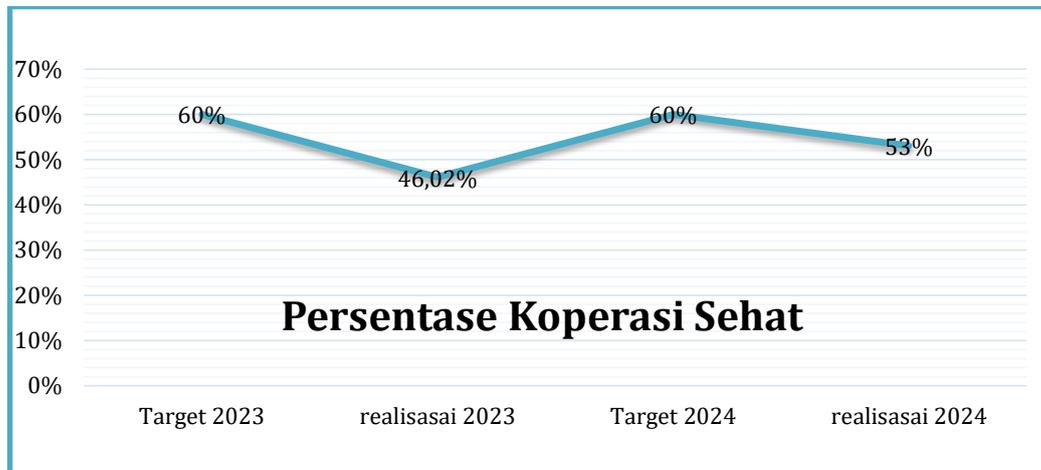
Uraian penjelasan data pendukung indikator:

Indikator persentase koperasi aktif dan persentase koperasi sehat data pendukung berdasarkan ODS (Online Data System) yang merupakan website yang dirancang khusus untuk membantu dalam mengelola data koperasi secara efisien, termasuk informasi anggota, laporan keuangan dan transaksi lainnya yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Gambar 3.8
Persentase Koperasi Aktif



Gambar 3.9
Persentase Koperasi Aktif



Melihat pada ilustrasi pada tabel diatas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai dari 90% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian indikator sudah baik. Secara umum untuk tujuan pertama yaitu terwujudnya koperasi berkualitas di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan indikator persentase koperasi aktif dan persentase koperasi sehat sudah tercapai. Tercapainya Indikator Tujuan ini diakibatkan beberapa hal antara lain :

1. Perbaikan kondisi ekonomi di Kabupaten Badung seusainya pandemi Covid 19 yang mendukung berjalannya usaha koperasi.
2. Adanya pemberian diklat (pendidikan dan pelatihan) ke koperasi serta pembinaan yang dilakukan oleh tenaga ahli ke koperasi di Badung sehingga menyebabkan meningkatnya sistem pengelolaan usaha koperasi sehingga koperasi menjadi lembaga yang mandiri dan sehat



Tabel 3.24
Pengukuran Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	Bidang Koperasi
		Persentase Koperasi Sehat	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100 \%$	Bidang Koperasi

Uraian penjelasan perhitungan pengukuran kinerja dan sumber data :

Indikator persentase koperasi aktif dan persentase koperasi sehat data pendukung berdasarkan ODS (Online Data System) yang merupakan website yang dirancang khusus untuk membantu dalam mengelola data koperasi secara efisien, termasuk informasi anggota, laporan keuangan dan transaksi lainnya yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Pemberian kredit kepada pihak ketiga/luar anggota lebih besar, pinjaman modal luar lebih kecil dari modal sendiri serta meningkatnya pemahaman anggota koperasi terkait dengan perkoperasian menyangkut hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab anggota. Untuk itu kedepannya akan terus diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan koperasi agar terus menjadi koperasi yang sehat dengan melaksanakan pelatihan pendampingan, meningkatkan modal penyertaan dari anggota, meningkatkan pinjaman kepada anggota, meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi, dan akan terus ditingkatkan pelaksanaan penilaian terhadap kesehatan koperasi baik dari sisi SDM maupun anggaran, serta mengoptimalkan program dan kegiatan pendukungnya. Pendapatan anggota koperasi dapat berasal dari sisa hasil usaha (SHU) yang didapat setiap tahun. Pembagian SHU diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Sumber pendapatan koperasi lainnya, di antaranya:



- Kontribusi anggota, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan pembelian saham
- Pendapatan usaha, seperti penjualan produk atau jasa koperasi
- Pendapatan dari investasi, seperti bunga bank dan dividen saham
- Pendapatan lainnya, seperti honor dan komisi

Munculnya kesadaran nasabah ketika berlangsungnya kegiatan ini. Pendapatan anggota koperasi dapat meningkat melalui beberapa cara, di antaranya:

1. Meningkatkan simpanan anggota
2. Membuka unit usaha baru
3. Memperluas kapasitas dan kualitas produksi
4. Menjadi agen distribusi dan promosi hasil produksi
5. Meningkatkan pelayanan kepada anggota
6. Memberikan bonus kepada anggota yang rajin menyimpan

Faktor penghambat kesuksesan koperasi:

1. Sumber daya manusia yang dalam hal ini berkaitan dengan pengurus dan karyawan yang menjadi peran utama dalam kesuksesan koperasi.
2. Kurangnya modal akibat dari sulitnya akses permodalan karena ruang lingkup koperasi masih terbatas, pada umumnya koperasi-koperasi di Indonesia masih tergantung pada instansi-instansi pemerintah.
3. Regulasi perkoperasian yang belum sepenuhnya mendorong koperasi untuk maju dan berkembang.
4. Pandangan masyarakat Indonesia yang memandang koperasi sebelah mata dan mengesampingkan keberadaan ekonomi.

Faktor pendorong kesuksesan koperasi diantaranya:

1. Sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang perkoperasian



2. Modal, yang merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi koperasi. Dengan adanya modal koperas dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Relasi koperasi yang dapat berupa relasi dengan koperasi-koperasi lain maupun lembaga pemerintahan, perusahaan dan sebagainya.
4. Manajemen Koperasi yaitu pengelolaan koperasi dengan melibatkan berbagai unsur yang ada dikoperasi seperti anggota, pengurus maupun karyawan. Manajemen koperasi lebih bersifat manajemen partisipatif.

Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing

Indikator : Jumlah Wirausaha baru

Indikator : Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status

Uraian penjelasan sasaran 7 :

Strategi pengembangan yang efektif adalah kunci dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu strategi utama adalah fokus pada inovasi produk dan layanan. Dengan terus memperbarui dan meningkatkan portofolio produk dan layanan mereka, UMKM dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik, bahkan mengantisipasi tren pasar yang akan datang. Inovasi juga membantu UMKM untuk membedakan diri dari pesaing, menciptakan nilai tambah yang unik, dan memperkuat citra merek mereka. Strategi pengembangan UMKM juga harus memperhatikan pemanfaatan teknologi. Adopsi teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jangkauan pasar. Platform e-commerce, pemasaran digital, dan sistem manajemen bisnis berbasis *cloud* adalah contoh teknologi yang dapat membantu UMKM untuk mencapai audiens yang lebih



luas, mengoptimalkan proses bisnis, dan mengumpulkan data berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Selanjutnya, strategi pengembangan UMKM harus mencakup penguatan branding dan citra merek. Membangun identitas merek yang kuat dan konsisten, serta menyampaikan pesan merek yang jelas dan menarik, membantu UMKM untuk menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan dan membedakan diri mereka dari pesaing. Komunikasi yang efektif tentang nilai-nilai merek dan keunggulan produk juga membantu meningkatkan kesadaran dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kerjasama dan kemitraan strategis juga merupakan bagian penting dari strategi pengembangan UMKM. Bergabung dengan asosiasi bisnis, berkolaborasi dengan pemasok atau distributor, atau bahkan mengembangkan kemitraan dengan kompetitor dapat membuka pintu untuk peluang baru, seperti akses ke pasar baru, distribusi yang lebih luas, atau berbagi sumber daya dan risiko. Kolaborasi semacam ini memperkuat posisi UMKM di pasar dan meningkatkan daya saing mereka. Terakhir, penting bagi UMKM untuk terus berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan, serta kepuasan pelanggan. Dengan memahami dan merespons kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan cepat, UMKM dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan memperoleh rekomendasi yang positif. Peningkatan kualitas produk dan layanan juga membantu memperkuat reputasi bisnis dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Tabel 3.25
Capaian Target dan realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian%
10.	Jumlah Wirausaha Baru	500	610	122%
11.	Jumlah Usaha Mikro Yang Mengalami Kenaikan Status	100	89	89%



Uraian Penjelasan Indikator :

Pada tahun 2024 indikator Jumlah Wirausaha Baru realisasinya 610 capaian 122%, sedangkan untuk indikator Jumlah Usaha Mikro Yang Mengalami Kenaikan Status realisasinya mencapai 89 dengan capaian 89%. Secara keseluruhan, strategi pengembangan UMKM yang efektif melibatkan kombinasi inovasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan merek, kerjasama strategis, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan strategi ini secara terpadu dan berkelanjutan, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka, memperluas pangsa pasar, dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan di pasar yang semakin kompetitif. Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dicapai melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan dukungan pemerintah. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM:

1. Inovasi

Inovasi produk dan layanan dapat meningkatkan daya saing UMKM. Inovasi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan penetrasi pasar.

2. Pemanfaatan teknologi digital

Teknologi digital dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saingnya.

3. Penguatan sumber daya manusia

Penguatan sumber daya manusia (SDM) dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saingnya.

4. Dukungan pemerintah

Pemerintah dapat membantu UMKM melalui kebijakan seperti akses keuangan, pelatihan, pengembangan kapasitas, regulasi, dan perlindungan usaha.

5. Kemitraan



Kemitraan dengan berbagai pihak, seperti BUMN dan swasta, dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saingnya.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, di antaranya: Mendorong pemerataan ekonomi, Meningkatkan pendapatan masyarakat, Mengurangi pengangguran, Pelestarian kearifan lokal, Kontribusi pada perekonomian nasional

Tabel 3.26
Pengukuran Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	%	$\frac{\text{Jumlah wirausaha baru}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100 \%$	Bidang UMKM
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	%	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil}}{\text{Jumlah total usaha mikro}} \times 100 \%$	Bidang UMKM

Uraian penjelasan perhitungan pengukuran kinerja dan sumber data :

Indikator Jumlah Wirausaha Baru realisasinya 610 capaian 122%, sedangkan untuk indikator Jumlah Usaha Mikro Yang Mengalami Kenaikan Status data pendukung berdasarkan data wirausaha baru dan usaha mikro serta mikro melalui hasil dari pendataan, bantuan UMKM. Sumber data dari Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Gambar 3.10
Jumlah Wirausaha Baru



Gambar 3.11
Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status



Melihat pada ilustrasi pada tabel diatas rata-rata capaian dari indikator sasaran hamper mencapai dari 90% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian indikator jumlah wirausaha baru pada tahun 2023 realisasinya 453 capaian 90,60%, sedangkan untuk indikator jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status realisasinya mencapai 85% dengan capaian 85%. Sedangkan untuk tahun 2024 indikator indikator jumlah wirausaha baru realisasinya 610 capaian 122%, sedangkan untuk indikator jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status realisasinya mencapai 89 dengan capaian 89%. Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

Faktor-faktor yang dapat mendukung pengembangan UMKM antara lain:

1. Modal



Modal yang cukup dapat membantu UMKM dalam memperluas usaha, membeli bahan baku, dan mengadopsi teknologi baru.

2. Kualitas produk

UMKM perlu meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar.

3. Manajemen

Manajemen yang efektif dapat membantu UMKM dalam meningkatkan inovasi dan daya saing.

4. Teknologi

UMKM perlu menerapkan teknologi yang tepat dan efisien untuk meningkatkan daya saing produk.

5. Pendidikan

Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas pelaku UMKM.

6. Pelatihan

Pelatihan keterampilan dan manajemen usaha dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas usahanya.

7. Kolaborasi

Kolaborasi dengan pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga riset, atau pemerintah dapat membantu UMKM dalam mengembangkan inovasi produk.

8. Promosi

UMKM dapat memanfaatkan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produknya.

Beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMKM) adalah :

1. Keterbatasan modal: Minimnya modal usaha merupakan salah satu masalah utama UMKM.



2. Keterbatasan SDM: Pelaku UMKM seringkali kurang memiliki pengetahuan dalam inovasi, riset pasar, dan adaptasi teknologi.
3. Keterbatasan akses informasi: UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
4. Kurangnya inovasi produk: UMKM yang tidak melakukan inovasi pada produknya akan mengalami penurunan nilai jual.
5. Minimnya literasi digital: UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi dan literasi digital.
6. Profit yang tidak berkelanjutan: UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mempertahankan profit.
7. Lokasi usaha kurang strategis: Lokasi usaha yang kurang strategis dapat menjadi penghambat pertumbuhan UMKM.
8. Teknologi produksi yang masih manual: UMKM seringkali masih menggunakan teknologi produksi yang manual.

Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung UMKM dengan memberikan kebijakan seperti: Pelatihan dan pengembangan kapasitas, Digitalisasi UMKM, Regulasi dan perlindungan usaha, Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif.



Tabel 3.27
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	11,30%	10,77%	95,31%
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	1,30%	0,57%	43,85%
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,56	93,07%
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	100%	124%	124%
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	100%	124%	124%
5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	2,25%	2,03%	92,22%
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	3%	2,84%	94,67%
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80%	76%	95%
		Persentase Koperasi Sehat	60%	53%	88,33%
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	500	610	122%
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	100	89	89%

Uraian penjelasan tabel :

Sasaran 1 Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan Realisasi kinerja pedagang informal menjadi formal pada tahun 2023 sebesar 10,57% dengan capaian 93,54%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10,77% dengan capaian 95,31%. **Sasaran 2** Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang dan jasa dengan indikator Tingkat Lonjakan Harga



pada tahun 2024 sebesar 0,57% dengan capaian 43,85% bila melihat data tabel diatas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai hampir 43,85% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran “Tingkat Lonjakan Harga” kurang baik. **Sasaran 3** Meningkatnya Nilai Ekspor dengan indikator Realisasi Ekspor pada tahun 2024 sebesar \$ 47.589.194,32,- dengan target 51.132.970,56,- realisasi capaian kinerja 93,07%, laporan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) sedangkan untuk Bea Cukai Sampit pada tahun 2024 tidak pernah menyampaikan data ekspor. **Sasaran 4** Pelayanan tera/ tera ulang pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya mencapai 3.100 UTTP dengan target 2.500 UTTP, sehingga tahun 2024 target Indikator Kinerja Sasaran Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dengan realisasi kinerja mencapai 124% dan untuk Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Alat UTTP Yang ditera/tera ulang dengan realisasi kinerja 124%, sedangkan untuk **sasaran yang ke 5** Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah dengan indikator kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah realisasinya 2,03% capaian 90,22%, sedangkan untuk indikator IKM yang meningkat omzetnya realisasinya mencapai 2,84% dengan capaian 94,67%. Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan industri di Kabupaten Kotawaringin Timur. **Sasaran yang ke 6** Meningkatnya Pendapatan Anggota Koperasi dengan indikator persentase koperasi aktif realisasinya 76% capaian 95%, sedangkan indikator persentase koperasi sehat realisasinya 53% dan capaiannya 88,33% **Sasaran yang ke 7** Meningkatnya Usaha Mikro yang Berdaya Saing dengan indikator jumlah wirausaha baru realisasinya 610 capaian 122% sedangkan indikator jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status realisasinya mencapai 89 dengan capaian 89%



Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	10%	9,30%	93%	11,30%	10,57%	93,54%	11,30%	10,77%	95,31%
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	1,25%	0,28%	22%	1,25%	1,01%	80,80%	1,30%	0,57%	43,85%
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 97.090.929,27	189,88%	\$ 51.132.970,56	\$ 53.849.355,00	105,31%	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,56	93,07%
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	100%	207,93%	208%	100%	146,60%	146,60%	100%	124%	124%
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	100%	207,93%	208%	100%	146,60%	146,60%	100%	124%	124%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024**

5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	1,75%	1,50%	86%	2%	1,75%	87,50%	2,25%	2,03%	92,22%
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	2,50%	2,10%	84%	2,50%	2,25%	90,00%	3%	2,84%	94,67%
6.	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80%	78,62%	98,27%	80%	78,12	97,58%	80%	76%	95%
		Persentase Koperasi Sehat	60%	46,02%	76,70%	60%	46,02	76,70%	60%	53%	88,33%
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	500	397	79,40%	500	453	90,60%	500	610	122%
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	100	80	80%	100	85	85%	100	89	89%



Uraian penjelasan tabel

Uraian penjelasan tabel :

Capaian kinerja pada tahun 2022 antara lain :

1. Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan dengan indikator Persentase Pedagang Informal menjadi Formal dengan capaian kinerja 93% lebih tinggi capaian dibandingkan tahun 2022, tidak mencapai 100% karena tidak ada program kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan Gedung pasar.
2. Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa dengan indikator Tingkat Lonjakan Harga, mendapatkan capaian kinerja sebesar 22,40% dengan Tingkat lonjakan harga 0,28%. Penekanan inflasi daerah dilakukan dengan cara pelaksanaan pasar murah dan pasar penyeimbang.
3. Meningkatnya Nilai Ekspor dengan indikator Meningkatnya Realisasi Ekspor mencapai 190% melampaui dari target yang ditetapkan.
4. Sasaran Meningkatnya Tertib Ukur terdiri dari 2 (dua) indikator yang pertama Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan yang kedua Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang mencapai 189,88%. Kabupaten seruyan dan Katingan melakukan tera dan tera ulang di Kotawaringin Timur.
5. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah dan indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya tidak mencapai target dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap barang produksi industri.
6. Meningkatnya pendapatan anggota koperasi memiliki 2 (dua) indikator yang pertama persentase koperasi aktif memperoleh capaian 98,27% sedangkan indikator persentase koperasi sehat hanya mencapai 76,70%



7. Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing memiliki 2 (dua) indikator yang pertama jumlah wirausaha baru capaiannya melampaui target dengan capaian sebesar 79,40%. Sedangkan untuk indikator yang ke dua jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status mencapai 80%.

Capaian kinerja pada tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan dengan indikator Persentase Pedagang Informal menjadi Formal dengan capaian kinerja 93,54% lebih tinggi capaian dibandingkan tahun 2022, tidak mencapai 100% karena tidak ada program kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan Gedung pasar.
2. Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa dengan indikator Tingkat Lonjakan Harga, mendapatkan capaian kinerja sebesar 80,80% dengan Tingkat lonjakan harga 1,01%. Kenaikan barang kebutuhan pokok naik secara signifikan pada tahun 2023 .
3. Meningkatnya Nilai Ekspor dengan indikator Meningkatnya Realisasi Ekspor mencapai 105,31% melampaui dari target yang ditetapkan.
4. Sasaran Meningkatnya Tertib Ukur terdiri dari 2 (dua) indikator yang pertama Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan yang kedua Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang mencapai 146,60%. Kabupaten seruyan dan Katingan melakukan tera dan tera ulang di Kotawaringin Timur.
5. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah dan indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya tidak mencapai target dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap barang produksi industri dan kurang promosi produk unggulan daerah.



6. Meningkatnya pendapatan anggota koperasi memiliki 2 (dua) indikator yang pertama persentase koperasi aktif memperoleh capaian 97,58% sedangkan indikator persentase koperasi sehat hanya mencapai 76,70%
7. Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing memiliki 2 (dua) indikator yang pertama jumlah wirausaha baru capaiannya melampaui target dengan capaian sebesar 90,60%. Sedangkan untuk indikator yang ke dua jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status mencapai 85%.

Capaian kinerja pada tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan dengan indikator persentase pedagang informal menjadi formal dengan capaian kinerja 93,54% lebih tinggi capaian dibandingkan tahun 2022, tidak mencapai 100% karena tidak ada program kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan Gedung pasar.
2. Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa dengan indikator Tingkat Lonjakan Harga, mendapatkan capaian kinerja sebesar 80,80% dengan Tingkat lonjakan harga 1,01%. Kenaikan barang kebutuhan pokok naik secara signifikan pada tahun 2023 .
3. Meningkatnya Nilai Ekspor dengan indikator Meningkatnya Realisasi Ekspor mencapai 105,31% melampaui dari target yang ditetapkan.
4. Sasaran Meningkatnya Tertib Ukur terdiri dari 2 (dua) indikator yang pertama Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan yang kedua Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang mencapai 146,60%. Kabupaten seruyan dan Katingan melakukan tera dan tera ulang di Kotawaringin Timur.
5. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah dan indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya tidak mencapai target



dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap barang produksi industri dan kurang promosi produk unggulan daerah.

6. Meningkatnya pendapatan anggota koperasi memiliki 2 (dua) indikator yang pertama persentase koperasi aktif memperoleh capaian 95% sedangkan indikator persentase koperasi sehat hanya mencapai 88,33%
7. Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing memiliki 2 (dua) indikator yang pertama jumlah wirausaha baru capaiannya melampaui target dengan capaian sebesar 122%. Sedangkan untuk indikator yang ke dua jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status mencapai 89%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.29
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI AWAL RENSTRA 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	8,00%	10,77%	11,30%	95,31%
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	0,99%	0,57%	1,30%	43,85%
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	\$ 51.242.970,29	\$ 47.589.194,56	\$ 51.132.970,56	93,07%
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	152,87%	124%	100%	124%
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	152,87%	124%	100%	124%
5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	1,50%	2,03%	2,50%	90,22%
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	2,10%	2,84%	3,50%	94,67%
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80%	76%	80%	95%
		Persentase Koperasi Sehat	60%	53%	60%	88,33%
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	500	610	500	122%
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	100	89	100	89%

Uraian penjelasan tabel :

1. Tingkat kemajuan Meningkatkan Kelembagaan Perdagangan adalah 95,31% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 10,77% dan target di 2026 sebesar 11.30%;
2. Tingkat kemajuan Meningkatkan Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa adalah 43,85% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 0,57% dan target di 2026 sebesar 1,30%;



3. Tingkat kemajuan Meningkatnya Nilai Ekspor adalah 93,07% dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar \$ 47.589.194,56 dan target di 2026 sebesar \$ 51.132.970,56;
4. Tingkat kemajuan Meningkatnya Tertib Ukur adalah 124% dengan capaian di tahun 2024 Tingkat kemajuan Meningkatnya Tertib Ukur adalah 124% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 124% dan target di 2026 sebesar 100%;
5. Tingkat kemajuan Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah untuk indikator Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah adalah 90,22% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 2,03% dan target di 2026 sebesar 2,50% sedangkan untuk indikator Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya adalah 94,67% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 2,84% dan target di 2026 sebesar 10,57%.
6. Tingkat kemajuan Meningkatnya pendapatan anggota koperasi untuk indikator Persentase Koperasi Aktif adalah 95% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 76% dan target di 2026 sebesar 80% sedangkan untuk indikator Persentase Koperasi Sehat adalah 88,33% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 53% dan target di 2026 sebesar 60%.
7. Tingkat kemajuan Meningkatnya Usaha Mikro Yang Berdaya Saing untuk indikator Jumlah Wirausaha baru adalah 122% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 610 dan target di 2026 sebesar 500 sedangkan untuk indikator Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status adalah 64,29% dengan capaian di tahun 2024 sebesar 89% dan target di 2026 sebesar 100.



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional
diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	PROVINSI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	10,77%	-	-	-
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	0,57%	-	2,99%	19%
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	\$ 47.589.194,56	-	\$ 30.970.000,82	154%
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	124%	-	98%	127%
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	124%	-	98%	127%
5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	2,03%	-	1,26	161%
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	2,84%	-	1,04	273%
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	76%	-	98%	78%
		Persentase Koperasi Sehat	53%	-	94%	56%
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	610	-	379	161%
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	89	-	95	94%



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	11,30%	10,77%	95,31%	Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan terutama bagi pasar tradisional memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten kotawaringin timur. Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum.	Untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga menjadi pasar yang nyaman, bersih dan sehat dengan tidak hanya bergantung pada APBD maka kami melakukan inovasi dengan menawarkan kerjasama pembangunan dan pengelolaan pasar melalui lelang investasi saat ini sudah terrealisasi untuk pembangunan pasar mangkikit. Upaya yang dilakukan untuk melakukan penataan pedagang kaki lima ialah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dagang bagi kaki lima dan melakukan pendataan dan sosialisasi tentang ketertiban untuk tidak berjualan dilokasi yang bukan diperuntukkan untuk berjualan . serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penertiban bagi pedagang kaki lima yang berjualan diarea terlarang



2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	1,30%	0,57%	43,85%	Menjelang hari besar keagamaan barang mahal Asumsi ini mendorong masyarakat untuk melakukan aksi beli dalam skala besar sebagai stok untuk mencukupi kebutuhan saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini, biaya distribusi mempengaruhi harga barang hingga 21% lebih.	Melakukan edukasi kepada konsumen terkait asumsi yang sering kali berkembang bahwa setiap kali menjelang hari besar keagamaan 'pasti barang mahal'. Asumsi ini mendorong mereka untuk melakukan aksi beli dalam skala besar sebagai stok untuk mencukupi kebutuhan saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Hal ini bila tidak disikapi dengan menjaga ketersediaan barang dan alur distribusi akan menimbulkan masalah kelangkaan barang, menambahkan, para pedagang pasar tradisional juga siap bekerja sama dengan Pemerintah baik di pusat maupun daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok ini. Maka subsidi distribusi dan pemangkasan jalur distribusi dapat mengurangi lonjakan harga. Untuk mewujudkan itu semua, sekali lagi pemerintah harus duduk bersama agar bisa memangkas rantai distribusi barang yang cukup panjang
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,56	93,07%	Potensi produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Timur masih didominasi oleh bungki dan cangkang sawit, diperlukan pengembangan produk ekspor baru sehingga tidak hanya tergantung pada cangkang sawit. Selain itu negara tujuan ekspor masih tergantung pada negara-negara tertentu diperlukan perluasan negara tujuan baru	Melakukan pendataan dan kajian tentang potensi produk unggulan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dijadikan produk ekspor. Selain itu untuk membuka akses pemasaran di negara tujuan ekspor baru seharusnya mengikuti kegiatan pameran produk di tingkat internasional untuk memperkenalkan produk unggulan



						pemasaran produk ekspor. Masih minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga akses pemasaran produk UKM selama ini masih terpaku pada pemasaran domestik. Adapun beberapa UKM yang sudah memiliki pasar di luar negeri terbentur dengan pengetahuan bagaimana cara ekspor sehingga produk yang mereka jual tidak dapat dipasarkan	Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu setiap tahun seharusnya melakukan pelatihan tentang ekspor bagi pelaku UKM dan IKM yang memiliki produk potensi ekspor sehingga kedepannya apabila ada UKM dan IKM yang memiliki potensi ekspor dapat melakukan pengiriman produknya secara langsung tanpa melalui perantara lagi.
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	100%	124%	124%	Pelayanan Tera dan Tera Ulang (UTTP) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Metrologi Legal belum maksimal karena keterbatasan petugas yang berhak untuk melakukan tera dan tera ulang dalam hal ini ialah fungsional penera yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Pada tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Disamping itu pula mempersiapkan untuk penambahan jumlah penera/ pegawai berhak baru pada tahun-tahun yang akan datang dengan memberikan biaya diklat kemetrologian bagi calon penera/ pegawai berhak
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	100%	124%	124%	Pengawasan kemetrologian saat ini belum maksimal dikerenakan belum memiliki pengawas dan PPNS Kemetrologian yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotawaringin Timur, serta minimnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang aturan kemetrologian	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta tentang kemetrologian serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi bergerak dibidang Metrologi Legal untuk bersama-sama melakukan pengawasan kemetrologian untukmenciptakan suatu daerah yang tertib ukur



5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	2,25%	2,03%	92,22%	Keterbatasan sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi industri, minimnya akses permodalan, perijinan, pemasaran produk	Pendampingan dan memfasilitasi IKM dalam akses permodalan, perijinan, dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh pelaku industri kecil
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	3%	2,84%	94,67%	Penerapan standarisasi produk, pengetahuan dan pemahaman pelaku industri kecil terhadap HKI merk dagang dan sistem mutu produk masih kurang	Pendampingan dan memfasilitasi dalam peningkatan daya saing mutu produk IKM melalui fasilitasi desain produk dan desain kemasan, pengurusan standarisasi produk dan fasilitasi HKI merk dagang
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80%	76%	95%	Tingkat partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah, Kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan dan informasi serta penggunaan teknologi tepat guna yang masih minim, Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk impor. Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim	Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi, yang disertai dengan adanya perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi.
		Persentase Koperasi Sehat	60%	53%	88,33%	Tingkat partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah, Kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan dan informasi serta penggunaan teknologi tepat guna yang masih minim, Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk impor. Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim	Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi, yang disertai dengan adanya perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi.



7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	500	610	122%	UMKM harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan karyawan agar mampu berinovasi dan bersaing di pasar yang dinamis. Penting bagi UMKM untuk mengelola keuangan dengan baik, mengoptimalkan penggunaan modal dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung inovasi produk. Manajemen yang efektif juga menjadi kunci untuk meningkatkan inovasi dan daya saing UMKM. UMKM perlu memperhatikan aspek manajemen secara holistik. Penerapan teknologi yang tepat dan efisien dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing produk. UMKM perlu terus memperbarui teknologi yang digunakan sesuai dengan perkembangan pasar. UMKM juga perlu memperhatikan faktor eksternal seperti pasar, persaingan, dan kebijakan pemerintah dalam merancang strategi inovasi produk. Kolaborasi dengan pihak terkait seperti lembaga riset, perguruan tinggi, atau pemerintah dapat membantu UMKM dalam mengembangkan inovasi produk yang lebih baik	Inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing UMKM. Kegiatan pemasaran yang konvensional kurang mampu mendongkrak pencapaian usaha secara maksimal mengingat saat ini telah memasuki dunia digital. Kunci utama dalam meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah yaitu dengan terus meningkatkan inovasi dan teknologi karena era digital merupakan era digitalisasi. Jika UMKM mampu mengadopsi teknologi digital dan berhasil menerapkan inovasi produk maka akan mampu lebih bersaing di pasar yang semakin ramai. Proses pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada bisa melalui mutu yang bagus, fungsi, dan karakteristik merupakan pengertian dari inovasi produk. UMKM harus mempunyai kemampuan dalam mengembangkan produk-produk inovatif yang menarik sehingga konsumen lebih memperhatikan serta mampu meningkatkan daya saing pasar
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	100	89	89%		



Uraian penjelasan tabel :

1. Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan dengan capaian sebesar 93,54% dapat dianalisa keberhasilannya karena meningkatnya aktivitas perdagangan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut dapat yaitu menyediakan sarana dan prasarana penunjang perdagangan seperti revitalisasi pasara dan sentra batik. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja.
2. Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa, pengendalian dan pengawasan harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan capaian sebesar 80,80% dapat dianalisa kegagalannya karena Barang kebutuhan pokok sangat rawan mengalami fluktuasi harga pada momen-momen tertentu seperti hari raya keagamaan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut dapat yaitu bekerja sama dengan distributor untuk menjaga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, melakukan pengawasan harga di pasar dan melaksanakan kegiatan pasar murah.
3. Meningkatnya Nilai Ekspor semakin menurun dari tahun sebelumnya ini mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Kotawaringin Timur di perdagangan nasional semakin menurun. Kekayaan alam yang melimpah sepertinya kurang berperan dalam peningkatan daya saing Kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian sebaliknya, jika daya saing meningkat hal ini mengindikasikan bahwa produk lokal Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kualitas unggulan sehingga mendapat pasar nya sendiri di luar kabupaten.
4. Meningkatnya Tertib Ukur, pelaksanaan tera-tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengawasan melebihi target yang telah ditetapkan. Yaitu dari target 2.500 UTTP mampu merealisasikan 3.100 UTTP ditera.



5. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah Keberhasilan industri akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu daerah. Peningkatan sektor industri dapat dilakukan melalui peningkatan industri kreatif, yang ditujukan demi pemereratnya kapasitas industri suatu daerah, lebih tepatnya industri-industri yang memiliki sifat kompetitif unggulan. Dibuatnya rencana meningkatkan sektor industri bisa mengembangkan penghasilan para pemilik serta karyawan industri itu sendiri, dan tak lupa menetapkan struktur industri di pelosok desa agar bisa memberikan suatu nilai lebih untuk desa tersebut Solusi untuk mengatasi hal tersebut dapat yaitu memberikan pelatihan produksi dan fasilitasi promosi.
6. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi, yang disertai dengan adanya perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi.
7. UMKM harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan karyawan agar mampu berinovasi dan bersaing di pasar yang dinamis. Penting bagi UMKM untuk mengelola keuangan dengan baik, mengoptimalkan penggunaan modal dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung inovasi produk. Manajemen yang efektif juga menjadi kunci untuk meningkatkan inovasi dan daya saing UMKM. UMKM perlu memperhatikan aspek manajemen secara holistik. Penerapan teknologi yang tepat dan efisien dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing produk.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.32
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	95,31 %	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan (pasar rakyat/ tradisional) yang terbangun untuk mendukung kegiatan perekonomian rakyat di wilayah Kab. Kotim	11,35%	Menunjang
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	43,85%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kebutuhan barang pokok dan barang strategis yang stabil di 17 Kec	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	105,31%	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	97,84%	Menunjang
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	124%	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah produk yang aman dan terkendali	70,53%	Menunjang
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	124%		Jumlah Sarana dan Prasarana Kemertologian		



5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	90,22%	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Yang Terdata IKM	49,37%	Menunjang
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	94,67%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah kawasan dan sentra IKM	98,98%	Menunjang
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	95%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pengawasan koperasi aktif	92,44%	Menunjang
		Persentase Koperasi Sehat	88,33%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat yang terawasi	98,80%	Menunjang
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	122%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah wirausaha	96,54%	Menunjang
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	89%	Program Pengembangan UMKM	Jumlah kenaikan status usaha mikro	72,13%	Menunjang



Uraian penjelasan tabel :

- Dilihat dari tingkat capaian program/kegiatan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang tidak menunjang adalah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (11,35%), Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (49,37%).
- Dari tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan diatas, Program/kegiatan yang menunjang adalah, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (100%), Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kab/Kota (100%), Program Pengembangan Ekspor (97,84%), Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (70,53%), Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (98,98%). Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (92,44%), Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (98,80), Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (96,54), Program Pengembangan UMKM (72,13%)

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan analisis capaian kinerja organisasi agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotawaringin Timur. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja pada Tabel 3.29 dibawah ini. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan



dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun Anggaran 2024 mendapat pagu Rp. 21.896.903.296,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.325.692.738,- atau 88,26 persen, yang terdiri atas belanja operasional sebesar Rp. 21.497.404.096,- dan terealisasi Rp. 19.139.942.738,- atau 89,03 persen dan belanja modal sebesar Rp. 399.499.200,- dan realisasi anggaran untuk belanja modal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 185.750.000,- atau mencapai 46,50 persen. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan meliputi :

Tabel 3.33
Realisasi Anggran Tahun 2024

NO.	NAMA KEGIATAN/ JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
SEKRTARIAT				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.006.591.496,-	11.798.676.900,-	80,15%
1.	Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,-	0	0
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000,-	0	0
1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ALat Tulis Kantor	12.000.000,-	0	0
2.	Administrasi Keuangan PD	8.283.158.724,-	7.160.158.963,-	86,44%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.283.158.724,-	7.160.158.963,-	86,44%



2.2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.400.000,-	0	0
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	315.215.000,-	298.944.609,-	94,84%
3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.880.000,-	0	0
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	187.040.000,-	182.200.949,-	97,41%
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	29.630.000,-	23.218.660,-	78,36%
3.4	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	93.665.000,-	93.525.000,-	99,85%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.005.861.600,-	992.117.376,-	98,63%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	48.882.500,-	48.380.500,-	98,97%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.131.400,-	40.402.100,-	93,67%
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.695.000,-	114.840.400,-	98,41%
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,-	45.000.000,-	100%
4.5	Penyediaan Bahan/Material	77.841.700,-	77.096.880,-	99,04%
4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	66.650.000,-	62.027.900,-	93,07%
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	607.661.000,-	604.369.616,-	99,46%
5.	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	401.970.200,-	188.100.000,-	46,79%
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	60.000.000,-	53.400.000,-	89%
5.2	Pengadaan Peralatan dan	136.071.000,-	134.700.000,-	98,99%



	Mesin Lainnya			
5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	205.889.200,-	0	0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.289.397.972,-	2.762.259.627,-	83,97%
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.670.000,-	7.670.000,-	100%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	755.418.000,-	540.886.526,-	71,60%
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.975.000,-	15.400.000,-	90,72%
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.509.334.972,-	2.198.303.101,-	87,61%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.588.000,-	397.096.325,-	57,67%
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.738.000,-	141.725.000,-	95,28%
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	207.840.000,-	167.560.325,-	80,62%
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.160.000,-	82.150.000,-	93,18%
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	243.850.000,-	5.661.000,-	2,32%
PERDAGANGAN				
II.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	262.308.500,-	29.771.000,-	11,35%
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	262.308.500,-	29.771.000,-	11,35%
1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	262.308.500,-	29.771.000,-	11,35%



III.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5.944.068.000,-	5.943.945.050,-	100%
1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	42.000.000,-	42.000.000,-	100%
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	42.000.000,-	42.000.000,-	100%
2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingn Di Tingkat Pasar Kab/Kota	5.902.068.000,-	5.901.945.050,-	100%
2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	302.068.000,-	301.945.050,-	100%
IV.	Program Pengembangan Ekspor	121.650.000,-	119.018.500,-	97,84%
1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.650.000,-	119.018.500,-	97,84%
1.1	Pameran Dagang Lokal	121.650.000,-	119.018.500,-	97,84%
V.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	170.160.000,-	120.018.924,-	70,53%
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	170.160.000,-	120.018.924,-	70,53%
1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	101.564.000,-	58.780.000,-	57,87%
1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	68.496.000,-	55.688.924,-	81,30%



PERINDUSTRIAN				
VI	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	337.940.000,-	334.478.260,-	98,98%
1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	337.940.000,-	334.478.260,-	98,98%
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Indutri dan Peran serta Masyarakat	337.940.000,-	334.478.260,-	98,98%
VII.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.222.000,-	16.895.800,-	49,37%
1.	Penyediaan Indormasi Industri untuk Informasi Indutri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	34.222.000,-	16.895.800,-	49,37%
1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kab/Kota melalui SINNAS	34.222.000,-	16.895.800,-	49,37%
KOPERASI				
VIII.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	112.670.000,-	111.320.000,-	98,80%
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	112.670.000,-	111.320.000,-	98,80%
1.1	Pelaksanaan Proseses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kab/Kota	112.670.000,-	111.320.000,-	98,80%
IX.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	166.556.000,-	153.971.590,-	92,44%
1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	166.556.000,-	153.971.590,-	92,44%



	yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota			
1.1	Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	166.556.000,-	153.971.590,-	92,44%
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				
X.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	667.600.000,-	644.533.914,-	96,54%
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	667.600.000,-	644.533.914,-	96,54%
1.1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	627.600.000,-	623.569.200,-	99,36%
1.2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	39.575.300,-	20.964.714,-	52,97%
XI	Program Pengembangan UMKM	73.562.000,-	53.062.800,-	72,13%
1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	73.562.000,-	53.062.800,-	72,13%
1.1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Disegn dan Teknologi	73.562.000,-	53.062.800,-	72,13%
Jumlah		21.897.327.996,-	19.325.692.738,-	88,26%



Melihat data tabel diatas pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki anggaran sebesar Rp. 21.897.327.996,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.325.692.738,- dengan persentase sebesar 88,26%.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya Anggaran dan Manusia dala, rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.34
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	HASIL PERKALIAN %CAPAIAN KINERJA DAN PAGU	HASIL PENGURANGAN DENGAN SERAPAN	NILAI EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN				
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	11,30%	10,77%	95,31%	Rp 262.308.500	Rp 29.771.000	11,35%	740%	Rp 250.005.534,96	Rp 220.234.534,96	EFISIEN
2.	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,30%	0,57%	43,85%	Rp.5.944.068.000	Rp 5.943.945.050	100%	-56,15%	Rp 2.606.245.200,00	Rp 3.337.699.850	BELUM EFISIEN
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,56	93,07%	Rp 121.650.000	Rp 119.018.500	97,84%	-4,87%	Rp 113.219.655,00	Rp 5.798.845,00	BELUM EFISIEN
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	124%	124%	Rp 170.160.000	Rp 120.018.924	70,53%	75,80%	Rp 210.998.400,00	Rp 90.979.476,00	EFISIEN
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang		100%	124%	124%	Rp 170.160.000	Rp 120.018.924	70,53%	75,80%	Rp 210.998.400,00	Rp 90.979.476,00	EFISIEN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2,25%	2,03%	90,22%	Rp 34.222.000	Rp 16.895.800	49,37%	82,74%	Rp30.875.848,89	Rp 13.980.048,89	EFISIEN
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3%	2,84%	94,67%	Rp 337.940.000	Rp 334.478.260	98,98%	-0,044	R 319.916.533,33	Rp 14.561.726,67	BELUM EFISIEN
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	80%	76%	95%	Rp 166.556.000	Rp 153.971.590	92,44%	2,76%	Rp 158.228.200	Rp 4.256.610,00	BELUM EFISIEN
		Persentase Koperasi Sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	60%	53%	88,33%	Rp 112.670.000	Rp 111.320.000	98,80%	-11%	Rp99.525.166,67	Rp 11.794.833,33	BELUM EFISIEN
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	500	610	122%	Rp 667.600.000	Rp 644.533.914	96,54%	26,37%	Rp 814.472.000	Rp 169.938.086,00	EFISIEN
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	Program Pengembangan UMKM	100	89	89%	Rp 73.562.000	Rp 53.062.800	72,13%	23,38%	Rp 65.470.180	Rp 12.407.380,00	EFISIEN



Uraian penjelasan tabel :

1. Sasaran Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan dengan indikator Persentase Pedagang Informal menjadi Formal tahun 2024 dengan capaian 95,31%, indikator tersebut tidak bisa mencapai target dikarenakan tidak adanya pembangunan gedung pasar sehingga pedagang informal belum 100% menempati kios/los pasar.
2. Sasaran Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa dengan Indikator Tingkat Lonjakan Harga pada tahun 2024 mencapai 0.57% dengan capaian 43,85%, harga kebutuhan pokok di kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur sering mengalami turun atau belum stabil. Yang sering mengalami kenaikan adalah beras, minyak telur dan gula.
3. Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor dengan indikator realisasi ekspor tahun 2024 dengan capaian 93,07, semua sektor meningkat, kecuali pertanian, kehutanan dan perikanan, Secara bulanan.
4. Indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dan Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang dapat melampaui target dikarenakan permintaan/pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar dan Perusahaan yang meningkat. Di Kabupaten seruyan dan Katingan masih melakukan pelaksanaan tera pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sehingga pada tahun 2024 2 (dua) indikator tersebut mendapat capaian kinerja sebesar 124%
5. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah dengan indikator Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah mencapai 90,22% dapat melalui kegiatan pameran dagang dan pertemuan bisnis sebagai upaya meningkatkan sekaligus menggalakkan usaha lokal, baik besar, sedang maupun kecil. Sedangkan Persentase IKM Yang Meningkat Omzetnya hanya



mencapai 94,67% dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya mencintai produk buatan Industri kecil dan menengah.

6. Sasaran meningkatnya pendapatan anggota koperasi dengan indikator persentase koperasi aktif mencapai 95%, sedangkan untuk indikator koperasi sehat mencapai 88,33% untuk mencapai 100% diperlukan pengawasan terhadap koperasi, dan melakukan RAT.
7. Sasaran meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing dengan indikator jumlah Wirausaha baru mencapai 122% semakin meningkatnya jumlah warausaha baru dikarenakan program/kegiatan untuk bantuan UMKM terlaksana dengan baik, sedangkan indikator jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status mencapai 89%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada table berikut :



Tabel 3.35
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	HASIL PERKALIAN % CAPAIAN KINERJA DAN PAGU	HASIL PENGURANGAN DENGAN SERAPAN	NILAI EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN				
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	11,30%	10,77%	95,31%	Rp 262.308.500	Rp 29.771.000	11,35%	740%	Rp 250.005.535	Rp 220.234.535	EFISIEN
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Lonjakan Harga	1,30%	0,57%	43,85%	Rp 5.944.068.000	Rp5.943.945.050	100%	-56,15%	Rp2.606.245.200	-Rp 3.337.699.850	BELUM EFISIEN
3	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 47.589.194,56	93,07%	RP 121.650.000	Rp 119.018.500	97,84%	-4,87%	Rp 113.219.034	-Rp 5.799.466	BELUM EFISIEN
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	100%	124%	124%	Rp 170.160.000	Rp 120.018.924	70,53%	75,80%	Rp 210.998.400	Rp 90.979.476	EFISIEN
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	100%	124%	124%	Rp 170.160.000	Rp 120.018.924	70,53%	75,80%	Rp 210.998.400	Rp 90.979.476	EFISIEN
5	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	2,25%	2,03%	90,22%	Rp 34.222.000	Rp 16.895.800	49,37%	82,74%	Rp 30.875.849	Rp 13.980.049	EFISIEN



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024**

6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	3%	2,84%	90,22%	Rp 337.940.000	Rp 334.478.260	98,98%	-4,35%	Rp 319.916.533	-Rp 14.561.727	BELUM EFISIEN
7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80%	76%	94,67%	Rp 166.556.000	Rp 153.971.590	92,44%	2,76%	R 158.228.200	Rp 4.256.610	EFISIEN
8	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	60%	53%	95%	Rp 112.670.000	Rp 111.320.000	98,80%	-10,60%	Rp 99.525.167	-Rp 11.794.833	BELUM EFISIEN
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Wirausaha baru	500	610	88,33%	Rp 667.600.000	Rp 644.533.914	96,54%	26,37%	Rp 814.472.000	Rp 169.938.086	EFISIEN
10	Program Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	100	89	122%	Rp 73.562.000	Rp 53.062.800	72,13%	23,38%	Rp 65.470.180	Rp 12.407.380	EFISIEN



Uraian penjelasan tabel :

- Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Kegiatan Tahun 2024, didapat data Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang nilai efisiensinya karena capaian indikator Persentase Pedagang Informal menjadi Formal pada tahun 2024 sudah mencapai target lebih dari 100%, dikerenakan program pembangunan gedung pasar jadi pedagang informal menempati los/kios;
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator Tingkat Lonjakan Harga, pada tahun 2024 belum bisa mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga pada capaian kinerja masih 43,85% jadi nilai efisiensinya masih belum efisien;
- Pencapaian Kinerja Program Pengembangan Ekspor mencapai 97,84% dengan anggaran sebesar Rp 121.650.000,- dan realisasi Rp 119.018.500,- sedangkan untuk capaian kinerja indikator Meningkatnya Realisasi Ekspor mendapatkan realisasi \$ 53.849.355,00 dengan target \$ 47.589.194,56 sehingga mendapatkan capaian sebesar 93,07% jadi tingkat efisiensinya masih belum efisien.
- Pencapaian Kinerja Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mencapai 98,05% dengan anggaran sebesar Rp 170.160.000,- dan realisasi Rp 120.018.924,- sedangkan untuk capaian kinerja indikator kinerja masing-masing mendapatkan capaian sebesar 124% jadi tingkat efisiensinya baik/efisien.
- Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mencapai 49,37% dengan anggaran sebesar Rp 34.222.000,- dan realisasi Rp 16.895.800, indikator kinerja Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah mendapatkan capaian sebesar 90,22% jadi tingkat efisiensinya baik/efisien 82,74%.



- Pencapaian Kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mencapai 98,98% dengan anggaran sebesar Rp 3379.40.000,- dan realisasi Rp 334.478.260,- indikator kinerja Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya mendapatkan capaian sebesar 90,22% jadi tingkat efisiensinya belum baik/efisien -4,35%.
- Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mencapai 92,44% dengan anggaran sebesar Rp 166.556.000,- dan realisasi Rp 153.971.590,- indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif mendapatkan capaian sebesar 95% jadi tingkat efisiensinya baik/efisien 2,76%.
- Pencapaian Kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 98,80% dengan anggaran sebesar Rp 112.670.000,- dan realisasi Rp 111.320.000,- indikator kinerja Persentase Koperasi Sehat mendapatkan capaian sebesar 88,33% jadi tingkat efisiensinya belum baik/efisien -4,35%.
- Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) mencapai 96,54% dengan anggaran sebesar Rp 667.600.000,- dan realisasi Rp 644.533.914,- indikator kinerja Jumlah Wirausaha baru mendapatkan capaian sebesar 122% tingkat efisiensinya baik/efisien 26,37%.
- Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mencapai 72,13% dengan anggaran sebesar Rp 73.562.000,- dan realisasi Rp 53.062.800,- indikator kinerja Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status mendapatkan capaian sebesar 89% jadi tingkat efisiensinya jadi tingkat efisiensinya baik/efisien 23,38%.





BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari persentase tingkat pencapaian kinerja sebesar 96,31% atau sangat baik dan capaian kinerja keuangan sebesar 78,80% atau baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dihadapi antara lain adalah :

1. Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum bersaing dengan produk di luar Kabupaten Kotawaringin Timur atau luar negeri;
2. Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga, sehingga masih sering terjadi pelanggaran dilapangan terutama dalam tertib ukur, penjualan produk ilegal dan produk olahan makanan yang membahayakan kesehatan;
3. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian produk impor;
4. Pola pikir konsumen yang lebih cenderung ke produk impor;



5. Masih kurangnya ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor;
6. Stabilitas harga bahan pokok dan panjangnya rantai distribusi
7. Masih rendahnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi
8. Kurang tersedianya lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang strategis dan representatif;

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing;
2. Memacu pertumbuhan industri yang menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mencegah defisit neraca perdagangan serta bersinergi dengan semua stakeholders dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro;
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah secara berkelanjutan;
4. Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat *high cost economic*, upah buruh, kenaikan TDL, dll;
5. Membuat standarisasi /SNI diberlakukan dengan ketat/*law enforcement* harus ditegakkan serta perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi harus diberi apresiasi/insentif;



6. Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka pengendalian impor serta memperketat pengawasan impor di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, 2 Januari 2025

**Plt. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Kotawaringin Timur**

FAHRUJIANSYAH, S.E.
Pembina Tk.I
NIP. 19730222 199803 1 008

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 - 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA BIDANG PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	%	$\frac{\text{Jumlah Pedagang Informal} - \text{Jumlah Pedagang formal}}{\text{Jumlah Pedagang}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	%	$\frac{\text{Harga thn } (n) - \text{Harga thn } (n - 1)}{\text{Harga thn } (n)} \times 100\%$	Bidang Perdagangan
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Realisasi Ekspor	\$	Jumlah Realisasi Ekspor	Bidang Perdagangan
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan
		Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	%	$\frac{\text{Jumlah Alat UTTP yang sudah ditera})}{\text{Jumlah seluruh alat UTTP}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan
5	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	%	$\frac{\text{Jumlah Industri Kecil} - \text{Jumlah Industri Menengah}}{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian
		Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya	%	$\frac{\text{Omzet IKM tahun } (n)}{\text{Omzet IKM tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Bidang Perindustrian
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	Bidang Koperasi
		Persentase Koperasi Sehat	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100 \%$	Bidang Koperasi
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	Jumlah	$\frac{\text{Jumlah wirausaha baru}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100 \%$	Bidang UMKM
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	Jumlah	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil}}{\text{Jumlah total usaha mikro}} \times 100 \%$	Bidang UMKM

Sampit, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur

Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si

NIP. 19691116 199403 1 006

Catatan :

UTTP : Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya

RENCANA AKSI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA		
						T1	T2	T3	T4			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Akuntabilitas dan Kinerja	100%	Administrasi Keuangan PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kasubbag. Keuangan		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kasubbag. Keuangan		
			100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
			100%	Administrasi Umum PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Bahan/Material							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
			100%	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
			100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			
2	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi formal	98%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					Kepala Bidang Perdagangan		
3	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	80%	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					Kepala Bidang Perdagangan		
			80%	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditingkat Pasar Kab/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi					Kepala Bidang Perdagangan		
4	Meningkatnya Nilai Ekspor	Realisasi Ekspor	99%	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal					Kepala Bidang Perdagangan		
5	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	90%	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					Kepala Bidang Perdagangan		
			80%	Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					Kepala Bidang Perdagangan		
6	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Naik Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	100%	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					Kepala Bidang Perindustrian		
			80%	Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kevenangan Kab/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kab/Kota melalui SINNAS					Kepala Bidang Perindustrian	
7	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	100%	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kab/Kota					Kepala Bidang Koperasi		
			100%	Persentase Koperasi Sehat	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					Kepala Bidang Koperasi	
8	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	100%	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					Kepala Bidang UMKM		
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan					Kepala Bidang UMKM		
		100%	Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Diseg dan Teknologi					Kepala Bidang UMKM		

Sampit, 2 Januari 2025
Pit. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

FAHRUJANSYAH, S.E.
Pembina Tk.I
NIP. 19691116 199403 1 006

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			
						REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	11,30%	Rp 262.308.500	10,77%	95,31%	Rp 29.771.000	11,35%
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,30%	Rp 5.944.068.000	0,57%	43,85%	Rp 5.943.945.050	100%
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Meningkatnya Realisasi Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	\$ 51.132.970,56	Rp 121.650.000	\$ 47.589.194,56	93,07%	Rp 119.018.500	97,84%
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	Rp 170.160.000	124%	124%	Rp 120.018.924	70,53%
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang		100%		124%			
5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2,25%	Rp 34.222.000	2,03%	90,22%	Rp 16.895.800	49,37%
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3%	Rp 337.940.000	2,84%	94,67%	Rp 334.478.260	98,98%
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	80%	Rp 166.556.000	76%	95%	Rp 153.971.590	92,44%
		Persentase Koperasi Sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	60%	Rp 112.670.000	53%	88,33%	Rp 111.320.000	98,80%
7	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Jumlah Wirausaha baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	500	Rp 667.600.000	610	122%	Rp 644.533.914	96,54%
		Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan status	Program Pengembangan UMKM	100	Rp 73.562.000	89	89%	Rp 53.062.800	72,13%
CAPAIAN KINERJA/REALISASI ANGGARAN					Rp 6.870.348.500		96,31%	Rp 6.564.127.534	78,80%

Sampit, 2 Januari 2025
Pit. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotawaringin Timur

FAHRUJANSYAH, S.E.
Pembina Tk.I
NIP. 19730222 199803 1 008

**POHON KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024**

R
P
J
M
D

R
E
N
S
T
R
A

MISI KE 3
Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Kemiskinan dan Penyediaan Lapangan Kerja
PRIORITAS PEMBANGUNAN 6
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
TUJUAN RPJMD
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
SASARAN RPJMD
Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Rakyat
TUJUAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya industri dan perdagangan yang efisien dan efektif yang mendukung persaingan sehat dan meningkatkan daya saing di pasar global
INDIKATOR TUJUAN
Persentase Kontribusi Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	MENINGKATNYA USAHA MIKRO YANG BERDAYA SAING	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	MENINGKATNYA KELEMBAGAAN PERDAGANGAN	MENINGKATNYA TERTIB USAHA PERDAGANGAN DAN STABILITAS HARGA BARANG DAN JASA	MENINGKATNYA NILAI EKSPOR	MENINGKATNYA TERTIB UKUR
INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase Koperasi Sehat	1. Jumlah Wirausaha Baru 2. Jumlah usaha Mikro Yang Mengalami Kenaikan Status	1. Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah 2. Persentase IKM yang Meningkatkan Omzetnya	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	Tingkat Lonjakan Harga	Realisasi Ekspor	1. Persentase Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku 2. Tingkat Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang
PROGRAM UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	PROGRAM UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	PROGRAM UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	PROGRAM UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	PROGRAM UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	PROGRAM UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	PROGRAM UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :
1. PROGRAM PENGAJAWAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI	1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Persentase Cakupan Koperasi Yang Memenuhi Standar Perkoperasian	1. Persentase Pelaku Kewirausahaan Terdidik 2. Persentase Cakupan UMKM	1. Persentase keterlolaannya data SINNAS 2. Jumlah kawasan dan sentra IKM	1. Jumlah sarana perdagangan (pasar rakyat/tradisional) yang terbangun untuk mendukung kegiatan perekonomian rakyat di wilayah Kab. Kotim.	Persentase kebutuhan barang pokok dan barang strategis yang stabil di 17 Kec	1. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	1. Jumlah produk yang aman dan terkendali 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kemetrologian 3. Jumlah masyarakat dan pengguna alat UTTP yg memahami tentang metrologi legal
KEGIATAN UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	KEGIATAN UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	KEGIATAN UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	KEGIATAN UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	KEGIATAN UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	KEGIATAN UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :	KEGIATAN UNTUK MELAKSANAKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :
1. Pemeliharaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota 2. Pemeliharaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota	1. Pemberdayaan Usaha mikro yang Dimiliki oleh Pemula, Pemuda, Perempuan, Kemiskinan, Kemudahan Perumahan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Reragakan 2. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan PKI Kewenangan Kab/Kota 2. Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1. Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Jumlah koperasi yang berkualitas	1. Jumlah UMK yang terfasilitasi lahan UMK 2. Jumlah Peserta Didlat Kewirausahaan bagi pelaku UMK	1. Jumlah Penerbitan Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan PKI Kewenangan Kab/Kota 2. Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	1. Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Data Harga Sembako dan Barang Strategis yang Termonitor	1. Jumlah eksporper yang terlayani	1. Jumlah produk yang tersertifikasi dan terstandarisasi mutu 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kemetrologian yang memadai 3. Jumlah pengusaha yang memahami tera dan tera ulang
JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN
Dana yang tersedia Rp 166.556.000 Rp 112.670.000	Dana yang tersedia Rp 667.600.000 Rp 73.562.000	Dana yang tersedia Rp 34.222.000 Rp 337.940.000	Dana yang tersedia Rp 262.308.500	Dana yang tersedia Rp 5.944.068.000	Dana yang tersedia Rp 121.650.000	Dana yang tersedia Rp 170.160.000

Sampit, 2 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotawaringin Timur

FAHRUJANSYAH, S.E.
NIP. 19730222 199803 1 008

**MENINGKATNYA TERTIB USAHA PERDAGANGAN DAN STABILITAS HARGA BARANG DAN JASA
(KEGIATAN MONITORING HARGA KEBUTUHAN POKOK, PASAR PENYEIMBANG DAN PASAR MURAH)**





PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

BULOG
Bernama Mewujudkan Kedaulatan Pangan

KOPERASI
MITRA SEPAKAT BERSAMA

Pasar Penyeimbang

KERJASAMA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DENGAN BULOG
SERTA KOPERASI MITRA SEPAKAT BERSAMA





vivo Y21
30 Mei 2023 08:59

vivo Y21
15 Mei 2023 07:30

Rabu, 24 Mei 2023 08:27:34 WIB
Jalan Ahmad Yani
Mentawa Baru Hulu
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
Budi Supriatna Sampit

Network: 24 Mei 2023 08:17:14 WIB
Local: 24 Mei 2023 08:17:13 WIB
-2°32'21,702"S 112°57'34,692"E
Jalan Ahmad Yani
Mentawa Baru Hulu
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
Index number: 1192



KEGIATAN PASAR MURAH



Promosi Produk Unggulan Sampit Trade Expo Tahun 2023



Sampit Trade Expo Tahun 2023



MTQ Tahun 2023



Trade Expo Indonesia Tahun 2023

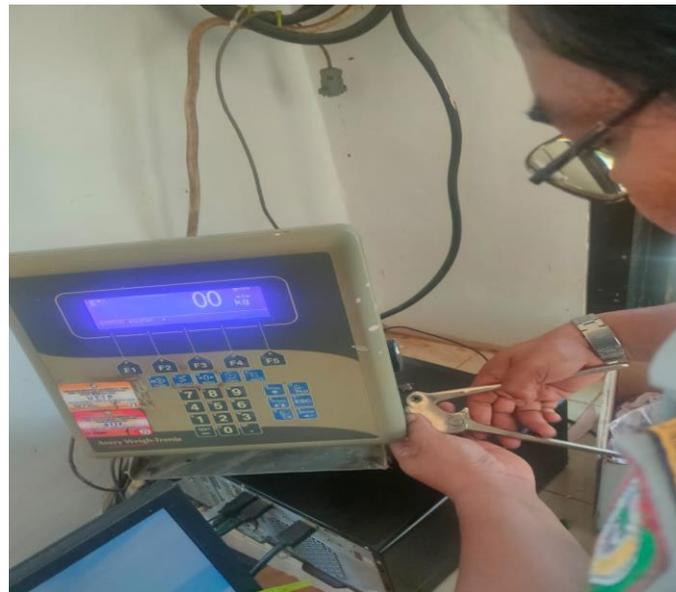




Indonesia Investment and Export Commodity Expo Tahun 2023



**MENINGKATNYA TERTIB UKUR
(PELAYANAN TERA/TERA ULANG UKUR TAKAR TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA)**





Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (Kegiatan Cek_Data_Pelaku IKM)





Konsolidasi dan Tranpormasi Kemasan di UPT Kemasan Prov Kalteng



Pendaftaran AKun SIIInas_SosSIEDI, Penyerahan Bantuan Kemasan



Pendampingan BIMTEK WAB dari Kementerian Ke Pelaku Usaha Industri Baru

